



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



BerAKHLAK >
bangga
melayani
bangsa



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini adalah perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan sekaligus diharapkan menjadi penyempurnaan dokumen perencanaan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di

masa yang akan datang. Hal ini juga merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Malili, 28 Maret 2024

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur
	1
	B. Posisi Strategis Kabupaten Luwu Timur
	4
	C. Isu-isu Strategis Kabupaten Luwu Timur
	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. PENGUKURAN KINERJA
	15
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
	18
	1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi
	Kinerja Tahun 2023
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
	Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan
	Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan
	Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

	4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	
	5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
	6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	
	C. REALISASI ANGGARAN	130
	D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	133
BAB IV	PENUTUP	
	A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA	138
	B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA	139
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bagian dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah Kabupaten yang terletak di ujung timur Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak diantara 2°03'00" sampai dengan 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" sampai dengan 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeek, namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran dan rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung berada dibagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran berada dibagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dan yang terluas berada di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili dan Kecamatan Mangkutana. Sedangkan kondisi berbukit dan bergunung yang terluas berada di Kecamatan Nuha, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, memiliki luas wilayah 6.944,88 km² atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan, 124 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Luwu Timur berada pada ketinggian 0 - 1.230 m diatas permukaan laut dengan struktur wilayah terdiri atas dataran rendah, tinggi dan wilayah pesisir. Kondisi topografi dan kelerengan berada pada kisaran 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 30%, 30 – 40% dan > 40%.

Kabupaten Luwu Timur sebagaimana daerah tropis lainnya, mempunyai suhu berkisar antara 22,5°C – 33,6°C, termasuk dalam tipe iklim A (*Schmidt – Ferguson*), dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2014 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 300 mm dengan rata-rata jumlah hujan perbulan mencapai 16 hari.



Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Semester II Tahun 2023 adalah 313.404 ribu jiwa yang terdiri dari 161.542 jiwa laki-laki dan 151.862. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 312,94 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Mangkutana sebesar 17,28 jiwa/km².

Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Daftar Bupati Masa Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur

No.	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Wakil Bupati	Ket.
—	 H. Andi Hetta Marakarna M.P.	3 Mei 2003	2005	—	—	
—	 Drs. Andi Baso Gani M.Si.	2005	2005	—	—	
1	 H. Andi Hetta Marakarna M.P.	27 Agustus 2005	27 Agustus 2010	1	H. Seldy Mansur	
		27 Agustus 2010	27 Agustus 2015	2	Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	
—	 H. Iman Yasir Limpo SH	30 Agustus 2015	17 Februari 2016	—	—	[10]
2	 Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	17 Februari 2016	24 Desember 2020	3	Irwan Bachri Syam ST	[10a, 1]
—	 Irwan Bachri Syam ST	24 Desember 2020	11 Februari 2021	—	—	
3		11 Februari 2021	17 Februari 2021	—	—	[11]
—	 Bahri Suli (Pelaksana Harian)	17 Februari 2021	26 Februari 2021	—	—	[12]
	Lowong	26 Februari 2021	5 April 2021	—	Budiman Hakim	[10a, 2]
4	 Budiman Hakim	5 April 2021	Petahana	4	—	[13]

Keterangan

- ¹ * Bupati Thoriq Husler meninggal pada saat menjabat^[10]
- ² * Muhammad Thoriq Husler memenangkan pilkada Luwu Timur 2020 bersama Budiman Hakim, tetapi Thoriq meninggal pada 24 Desember 2020, sehingga Budiman Hakim diangkat sendiri sendiri sebagai Wakil Bupati Luwu Timur^{[12][13]}

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah sebanyak 41.

Di samping Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdapat pula kelompok 3 (tiga) Jabatan Struktural Staf Ahli yakni, 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, 2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepegawaian

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.795 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerjasama (P3K) sebanyak 1.306. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 293 orang, golongan III sebesar 2602 orang, dan golongan IV sebanyak 894 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1353 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 2442 orang.

B. POSISI STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penyusunan kembali terhadap Dokumen RPJMD untuk periode Bupati terpilih 2022-2026 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2022-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.

RPJMD daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat,

terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah yakni “Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Dalam rumusan visi terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Kata kunci tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

Berkelanjutan adalah mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat diteruskan ke masa depan, kemudian apa yang buruk di masa lalu hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan.

Lebih Maju adalah bahwa apa yang akan dilakukan kedepan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang baik dimasa lalu tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya adalah bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

C. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan urusan, Isu Global, Isu Nasional dan Isu Provinsi tersebut, maka prioritas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2022-2026 dapat diuraikan. Prioritas ini disusun dengan menggunakan kriteria kesesuaian dengan visi-misi Kepala Daerah, tingkat kompleksitas dan kepentingan masalah, tingkat kemendesakan masalah untuk diatasi, dan kriteria lainnya. Uraian isu strategis tersebut dinyatakan dalam bentuk poin isu, dengan alasan bahwa penjelasan berbagai aspek atas isu-isu tersebut telah diuraikan pada identifikasi permasalahan, isu global, isu nasional, dan isu propinsi. Adapun daftar prioritas isu strategis daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pemberdayaan gender;
4. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah;
5. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha;
6. Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah;
7. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
10. Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat;
11. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD 2021-2026 disebutkan VISI Kabupaten Luwu Timur adalah: ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***, dengan misi:

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh.
2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas.
3. Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas.
4. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.
5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat.
6. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya

Selanjutnya, dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu

1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman
6. Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada akhir periode RPJMD 2026. Adapun tujuan, Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja, serta Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 : Matriks Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2026**

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh	1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
		2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	Mandiri
		3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	92,15
II.	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas	4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	2,23
		5.	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30
III.	Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas	6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	75,59
		7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	88,70

				Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)
IV.	Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A (Baik)
				Nilai SAKIP Daerah	A
		9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan SPM	90
				IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	88,32
V.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat	10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	77,90
VI.	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya	11.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat	95
				Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	95

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, dimana dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran yang tertuang dalam IKU 2022-2026, diperjanjikan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja untuk dilaksanakan guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Bupati Luwu Timur Tahun 2023 merupakan rangkuman dari penetapan kinerja dari beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang indikator kinerja utamanya ditentukan dari penyesuaian atau pemetaan terhadap sasaran strategis Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan perjanjian kinerja tiap –tiap SKPD yang telah di tandatangani antara Pihak pertama dengan Kepala OPD yang bersangkutan akan dikembalikan ke masing-masing OPD untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh	1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,10
		2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	Maju

		3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	90,00
II.	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas	4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,98
		5.	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05
III.	Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas	6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,93
		7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	88,10
				Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)
IV.	Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A (Baik)
				Nilai SAKIP Daerah	BB
		9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan SPM	82,42
				IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	82,21

V.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat	10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	76,81
VI.	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya	11.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat	95
				Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	95

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkan RKA tahun 2023, yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) program sebagai berikut :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.396.136.155
Program Pengelolaan Pendidikan	119.436.143.293
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.992.185.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.843.540.608
Program Administrasi Pemerintahan Desa	791.552.400
Program Rehabilitasi Sosial	1.079.879.900
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	349.124.384
Program Perlindungan Perempuan	1.090.453.107
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	296.148.052

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	693.525.740
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.618.074.600
Program Penyuluhan Pertanian	6.466.679.279
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.189.648.530
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.092.610.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	976.414.480
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	974.435.800
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif	937.896.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	161.694.290
Program Pelayanan Penanaman Modal	312.788.200
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.167.740.200
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.318.416.255
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.052.820.000
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	12.323.387.240
Program Penatagunaan Tanah	342.466.500
Program Kawasan Permukiman	7.242.236.935
Program Penyelenggaraan Jalan	119.582.537.880
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.182.251.121
Program Penataan Bangunan Gedung	26.982.987.825
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	147.909.060
Program Penanggulangan Bencana	675.381.242
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	340.033.852.828
Program Aplikasi Informatika	2.494.705.000

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.795.973.040
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	50.048.357.547
Program Perekonomian dan Pembangunan	2.380.074.653
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.066.160.000
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	27.095.000
Program Pengembangan Kebudayaan	2.029.208.900
Jumlah	871.592.486.039

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah laporan akhir yang memuat pertanggungjawaban kinerja yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan pencapaian tahun pertama RPJMD Periode 2021-2026. Dalam penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilahan data dari setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh perangkat daerah yang menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian sasaran kinerja diperoleh dengan membandingkan target yang ditetapkan setiap tahun dengan realisasi target pada indikator sasaran kinerja. Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam membandingkan yaitu, *pertama* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yang *kedua* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan 11(sebelas) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,10	75,84	102,35
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan berkelanjutan	2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju (0,707)	Maju (0,707)	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,00	90,96	101,07
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,98	1,19	60,10
5	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05	5,42	56%
6	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	6.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,93	84,27	112,46
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	88,10	80,09	90,91
		8.	Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)	152,28 (tinggi)	133 %
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A (78,438)	100
		10	Nilai SAKIP Daerah	BB (71,00)	B (66,51)	93,68
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.	IKM Pelayanan SPM	84,75	98,49**	116,21%
		12.	IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	84,31	87,84	104,19%
10	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	13	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	76,81	81,67	106,33%

11	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	14.	Cakupan Penerapan Nilai Agama dan Masyarakat	95	96,1	101,16%
		15.	Cakupan Penerapan Nilai Budaya dan Masyarakat	95	82,4	86,74%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hingga Akhir Tahun 2023 yang merupakan Tahun Kedua RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan melalui 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam IKU Tahun 2022-2026. Selanjutnya ditetapkan 15 Sektor dan Program Prioritas dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 15 (empat belas) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh”** dengan tujuan **“Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat ”**. Untuk mencapai misi 1, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA YANG BEDAYA SAING* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,10	75,84	102,35
Rata-Rata Capaian Kinerja			102,35%		

A. Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022, formulasi cara memperoleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

RUMUS			
$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{[X_{(i)maks} - X_{(i)min}]}$ Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM			
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ditargetkan sebesar 74,10, adapun realisasi kinerja dari target berada pada angka 75,84 dengan capaian kinerja 102,35%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 meningkat 0,43 poin (0,57 persen) dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yang berada pada angka 75,41.

Jika melihat data capaian kinerja IPM yang terdapat pada dokumen Laporan Kinerja Luwu Timur Tahun 2022 yaitu 73,92, terjadi perbedaan dengan data capaian IPM 2022 yang digunakan untuk perbandingan dengan capaian kinerja IPM 2023 pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan karena sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu dimensi pembentuk IPM mengalami perubahan dari sumber data SP2010 ke sumber data LF SP2020 disebabkan terjadi perubahan karakteristik demografi dalam sepuluh (10) tahun terakhir. Oleh karena itu pada saat melakukan update capaian kinerja IPM 2022 menggunakan sumber data LF SP2020, nilai IPM

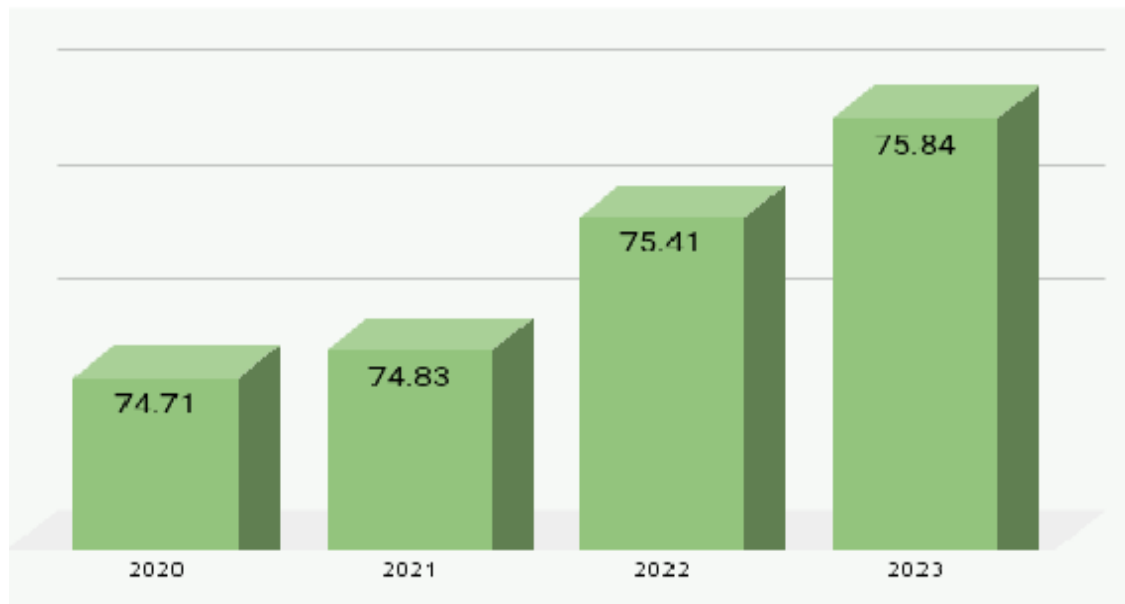
yang sebelumnya 73,92 berubah menjadi 75,41, sehingga untuk menjamin data yang akurat dan terbaru pada penyusunan dokumen laporan kinerja tahun 2023 menggunakan perhitungan data hasil updating untuk IPM Tahun 2022 yaitu 75,41.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Pembangunan manusia di Luwu Timur terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Luwu Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Luwu Timur rata-rata meningkat sebesar 0,5 persen per tahun, dari 74,71 pada tahun 2020 menjadi 75,84 pada 2023

Peningkatan IPM Luwu Timur 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,01 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,33 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,41 persen menjadi 0,32 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,11 persen. Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,08 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1. Adapun grafik pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur periode 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 1 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Periode 2020-2023

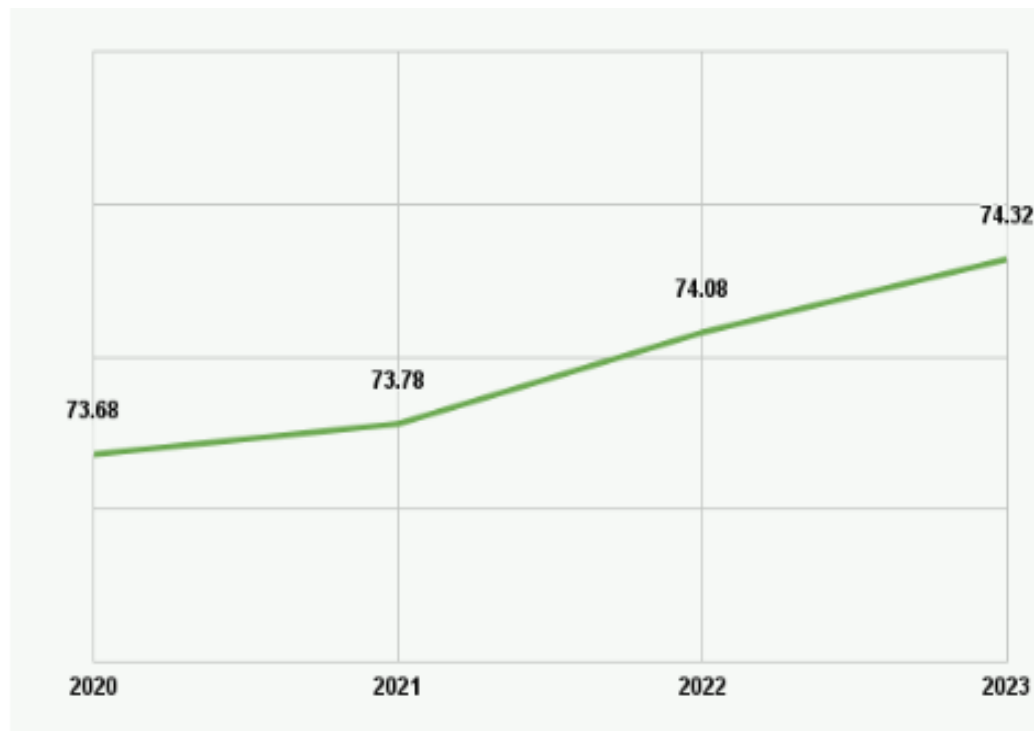
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur menurut dimensi penyusunnya, 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,68	73,78	74,08	74,32
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,83	12,84	13,00	13,01
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,80	8,81	8,92	8,93
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.814	12.886	13.058	13.451
IPM		74,71	74,83	75,41	75,84

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Angka Harapan Hidup)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,47 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Luwu Timur adalah 73,68 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 74,32 tahun. UHH 2023 meningkat 0,24 tahun (0,32 persen) dibanding tahun sebelumnya, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 yang meningkat 0,41 persen (0,30 tahun). Adapun perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

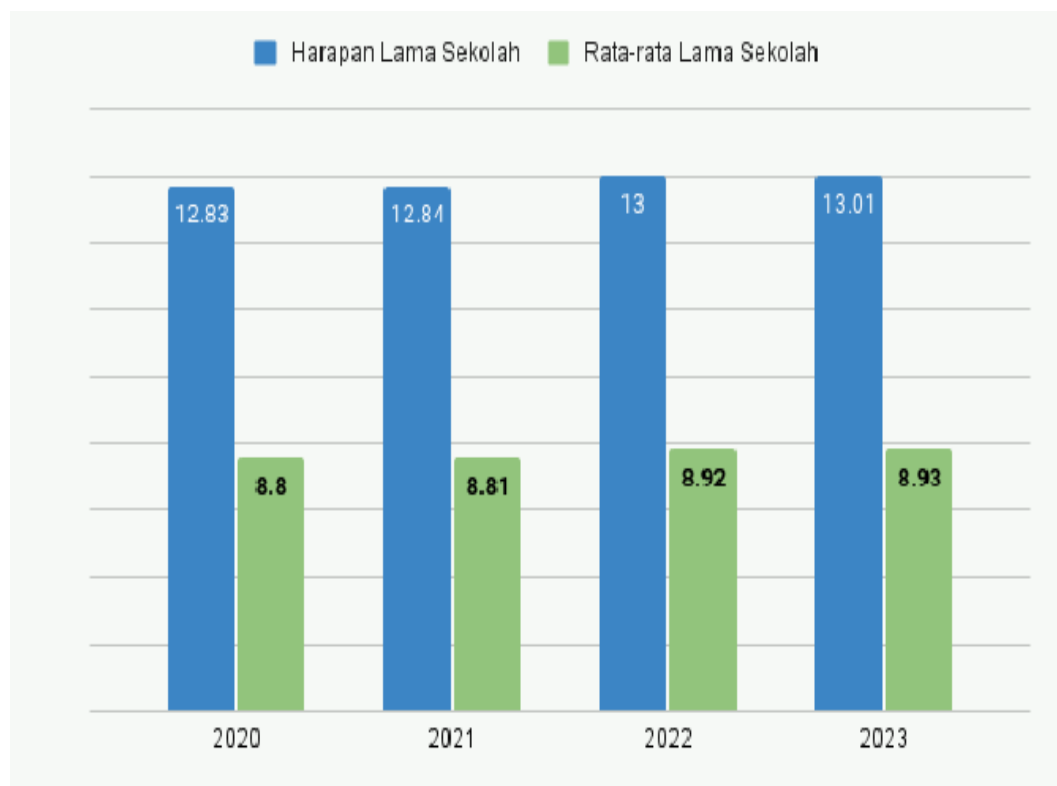


Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Luwu Timur, 2020-2023

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

B. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah)

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Luwu Timur rata-rata meningkat 0,47 persen per tahun sementara RLS meningkat 0,49 persen per tahun. HLS dan RLS Luwu Timur 2023 meningkat 0,01 tahun dibandingkan 2022. Adapun perkembangan capaian angka rata-rata lam sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

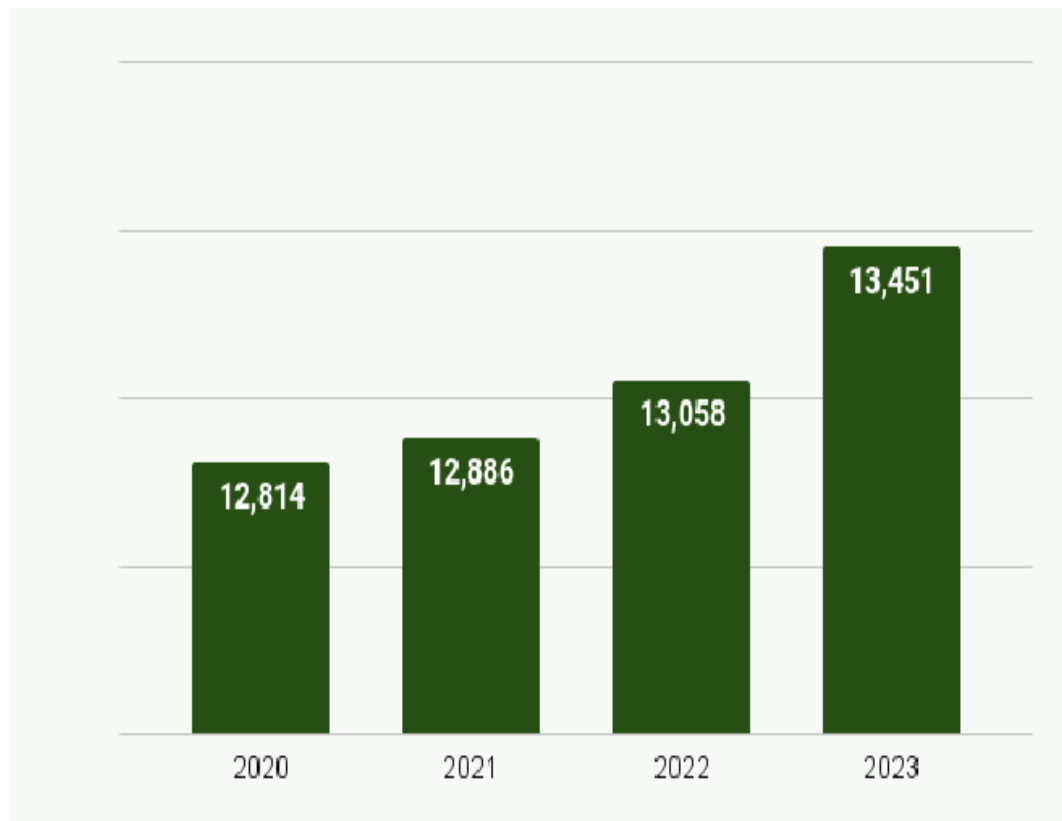


Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Luwu Timur, 2020-2023

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

C. Dimensi Standar Layak Hidup

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan masyarakat Luwu Timur mencapai Rp 13,45 juta per tahun. Capaian ini meningkat 393 ribu rupiah (3,01 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Adapun perkembangan standar hidup layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



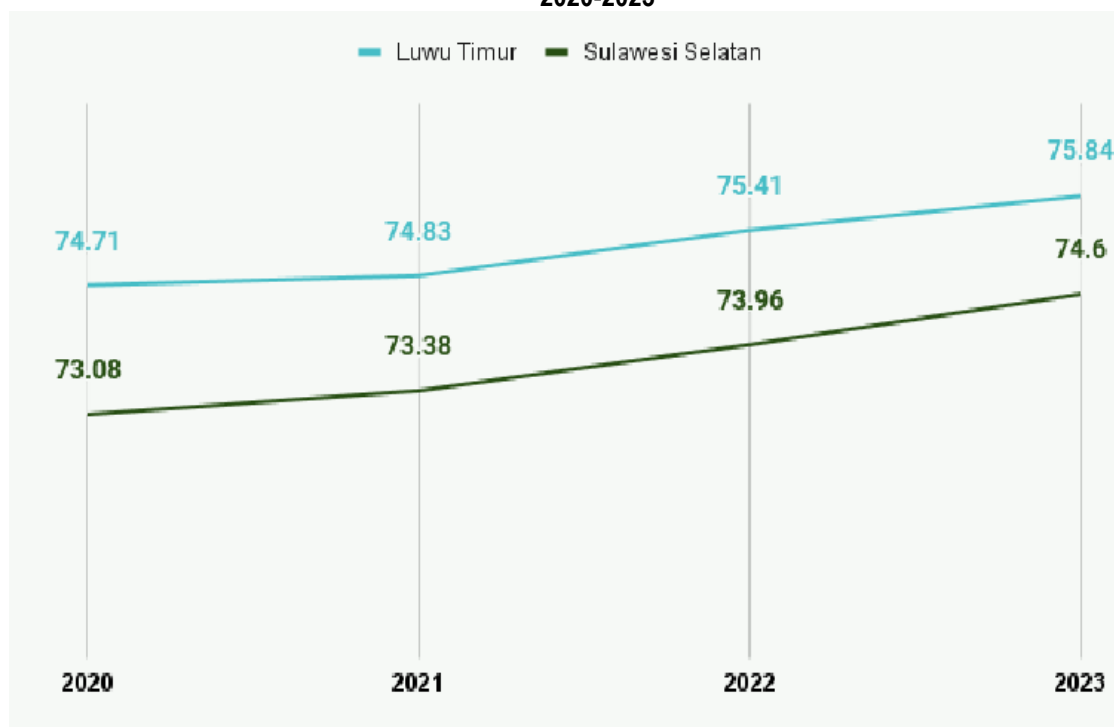
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP) 2020-2023 (Rp.000)

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Provinsi Selatan

Selama 2020-2023, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2023, nilai IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi (75,84) dibanding nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan (74,6). Tingginya pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM, diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita per tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur berstatus “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$).

Gambar Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2023



Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020-2023

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur 2024)

Komponen	Satuan	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Panjang dan Hidup Sehat			
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,32	73,63
Pengetahuan			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,01	13,54
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,93	8,76
Standar Hidup Layak			
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	13.451	11.841
IPM		75,84	74,60

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Pembentuk, 2023.

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur 2024)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan realisasi indikator kinerja tahun kedua yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	2020	73,22	-
		2021	73,13	-
		2022	75,41	102,18%
		2023	75,84	102,35%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	75,41	74,10	75,84	74,40	-	74,70	-	75,00	-

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

IPM tingkat Nasional tahun 2023 mencapai 74,39 meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 menempati peringkat ke 4 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, berada dibawah Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare.. Selama periode 2020-2023 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan, selain itu juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun IPM dan

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu Rupiah)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kepulauan Selayar	73.05	73.27	12.67	12.69	8.09	8.35	9,446	9,830	70.27	71.13
Bulukumba	73.67	74.01	13.42	13.43	8.01	8.26	10,941	11,392	72.75	73.64
Bantaeng	72.46	72.67	12.30	12.53	6.81	7.09	12,133	12,304	70.41	71.28
Jeneponto	73.60	73.81	12.11	12.12	6.75	7.00	9,425	9,781	68.13	68.95
Takalar	73.16	73.43	12.48	12.49	7.64	7.66	10,746	11,239	70.86	71.46
Gowa	73.86	74.03	13.66	13.70	8.40	8.41	9,812	10,233	72.44	73.01
Sinjai	72.60	72.83	13.25	13.26	7.79	7.80	9,726	10,180	70.60	71.20
Maros	73.38	73.55	13.30	13.50	8.02	8.03	11,403	11,795	72.92	73.56
Pangkajene dan Kepulauan	72.62	72.87	12.78	12.80	8.05	8.31	11,817	12,241	72.41	73.23
Barru	72.37	72.57	13.61	13.62	8.25	8.54	11,275	11,712	72.96	73.80
Bone	72.91	73.20	12.99	13.00	7.36	7.54	9,277	9,682	69.43	70.25
Soppeng	73.17	73.47	13.20	13.21	7.96	8.27	9,756	10,098	71.05	71.94
Wajo	72.97	73.25	13.30	13.31	7.16	7.45	12,729	13,192	72.69	73.56
Sidenreng Rappang	74.17	74.32	13.01	13.02	8.04	8.20	12,379	12,739	73.81	74.38
Pinrang	74.29	74.47	13.25	13.27	8.04	8.30	12,102	12,559	73.90	74.70
Enrekang	73.76	73.92	13.86	13.87	8.93	8.94	11,183	11,636	74.61	75.11
Luwu	73.06	73.30	13.40	13.41	8.48	8.73	10,308	10,691	72.42	73.23
Tana Toraja	74.38	74.63	13.87	13.88	8.52	8.60	7,584	8,017	70.16	71.01
Luwu Utara	73.24	73.56	12.58	12.59	7.87	8.14	12,105	12,513	72.48	73.31
Luwu Timur	74.08	74.32	13.00	13.01	8.92	8.93	13,058	13,451	75.41	75.84
Toraja Utara	74.72	74.88	13.41	13.42	8.26	8.51	8,494	8,871	70.83	71.69
Kota Makassar	74.96	75.15	15.59	15.61	11.55	11.56	17,406	17,889	84.45	84.85
Kota Parepare	74.25	74.44	14.52	14.54	10.66	10.70	14,027	14,495	79.87	80.36
Kota Palopo	73.81	74.00	15.10	15.12	11.09	11.13	13,404	13,892	80.24	80.77
Sulawesi Selatan	73.40	73.63	13.53	13.54	8.63	8.76	11,430	11,841	73,96	74,60

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Peningkatan umur harapan hidup saat lahir :
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan seperti peningkatan pelayanan puskesmas PONED, Audit Maternal dan Perinatal (AMP), Perbaikan gizi, pemberian vitamin dan tablet FE pada remaja putri;
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular;
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui program UHC (universal Health coverate);
 - Memperbaiki status kesehatan gizi masyarakat.
 - Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sehat;
 - Perbaikan kesehatan lingkungan;
 - Peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Optimalisasi promosi kesehatan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - ketersediaan obat dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.
- ✓ Peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun
 - Pendidikan gratis dan pemberian perlengkapan sekolah gratis SD dan SMP
- ✓ Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah
 - Layanan program pendidikan keaksaraan
 - Layanan Pendidikan kesetaraan paket A,B dan C
- ✓ Standar Layak Hidup
 - Penghasilan/penerimaan yang semakin wajar.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - Pengembangan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - Pengadaan Obat, Vaksin;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- Operasional Pelayanan Puskesmas;
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindaklanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- Program Pengelolaan Pendidikan:
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :
 - Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utulitas Sekolah;
 - Pembangunan Rumah Dinas/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Laboratorium;
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - .Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - Pengadaan Mebel PAUD;

- Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD;
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Non Formal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.343.515.323.850 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.334.149.966.846 atau 97,27% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini sebesar 2,73%. Artinya daya serap penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan dengan realisasi kinerja yang tercapai secara signifikan bahkan melebihi target.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN* ” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Desa Membangun	Status	Maju (0,707)	Maju (0,707)	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja			100%		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Desa Membangun*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh status Indeks Desa Membangun adalah :

$$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$$

Keterangan:

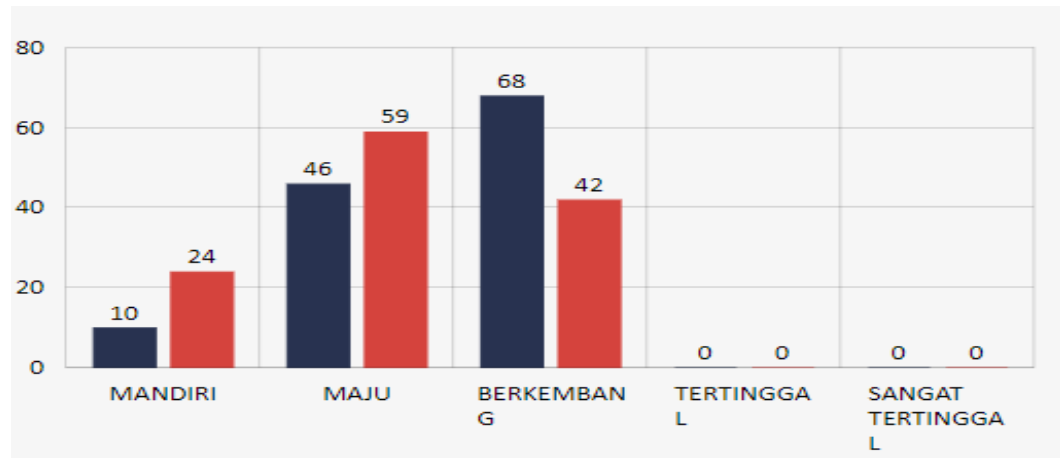
IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi

IL: Indeks Lingkungan

. Untuk indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan target kinerja tahunan yaitu status desa MAJU (0,707), dan realisasi capaian kinerja adalah status Desa MAJU (0,707), dengan persentase capaian Kinerja 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian target. Jika dilihat tabel perkembangan desa menurut status menunjukkan bahwa terjadi peningkatan masing-masing status desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023



(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024)

Tabel Perbandingan Status IDM Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

	2022		2023	
MANDIRI	10	8.06%	24	19.20%
MAJU	46	37.10%	59	47.20%
BERKEMBANG	68	54.84%	42	33.60%
TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan

dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**TABEL PERUBAHAN STATUS DESA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
TAHUN 2023**

No.	Kode Desa	Nama Desa	Nama Kec	Nilai IDM Tahun 2023	Status Desa
1	7324012001	MALEKU	MANGKUTANA	'0.7871	MAJU
2	7324012002	WONOREJO	MANGKUTANA	'0.8781	MANDIRI
3	7324012003	MARGOLEMBO	MANGKUTANA	'0.7183	MAJU
4	7324012004	TEROMU	MANGKUTANA	'0.7078	MAJU
5	7324012007	MANGGALA	MANGKUTANA	'0.7103	MAJU
6	7324012009	KASINTUWU	MANGKUTANA	'0.6590	BERKEMBANG
7	7324012011	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA	'0.7640	MAJU
8	7324012013	PANCA KARSA	MANGKUTANA	'0.6859	BERKEMBANG
9	7324012014	SINDU AGUNG	MANGKUTANA	'0.7287	MAJU
10	7324012015	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA	'0.8840	MANDIRI
11	7324012016	KORONCIA	MANGKUTANA	'0.8124	MAJU
12	7324022001	NUHA	NUHA	'0.6229	BERKEMBANG
13	7324022003	NIKKEL	NUHA	'0.8343	MANDIRI
14	7324022005	MATANO	NUHA	'0.6603	BERKEMBANG
15	7324022009	SOROWAKO	NUHA	'0.8381	MANDIRI
16	7324032001	LOEHA	TOWUTI	'0.7425	MAJU
17	7324032002	MAHALONA	TOWUTI	'0.6532	BERKEMBANG
18	7324032003	TIMAMPU	TOWUTI	'0.8508	MANDIRI
19	7324032004	WAWONDULA	TOWUTI	'0.9144	MANDIRI
20	7324032005	LANGKEA RAYA	TOWUTI	'0.8256	MANDIRI

21	7324032006	TOKALIMBO	TOWUTI	'0.6978	BERKEMBANG
22	7324032007	BARUGA TWT	TOWUTI	'0.9240	MANDIRI
23	7324032008	PEKALOA	TOWUTI	'0.7678	MAJU
24	7324032009	LIOKA	TOWUTI	'0.7973	MAJU
25	7324032010	ASULI	TOWUTI	'0.8221	MANDIRI
26	7324032011	BANTILANG	TOWUTI	'0.6311	BERKEMBANG
27	7324032012	MASIKU	TOWUTI	'0.6437	BERKEMBANG
28	7324032013	RANTE ANGIN	TOWUTI	'0.7963	MAJU
29	7324032014	MATOMPI	TOWUTI	'0.7138	MAJU
30	7324032015	TOLE	TOWUTI	'0.6408	BERKEMBANG
31	7324032016	LIBUKAN MANDIRI	TOWUTI	'0.7446	MAJU
32	7324032017	KALOSI	TOWUTI	'0.6151	BERKEMBANG
33	7324032018	BUANGIN	TOWUTI	'0.6946	BERKEMBANG
34	7324042001	HARAPAN	MALILI	'0.7416	MAJU
35	7324042002	LASKAP	MALILI	'0.8492	MANDIRI
36	7324042004	MANURUNG	MALILI	'0.8229	MANDIRI
37	7324042005	WEWANGRIU	MALILI	'0.7911	MAJU
38	7324042006	BARUGA MLL	MALILI	'0.8673	MANDIRI
39	7324042007	LAKAWALI	MALILI	'0.9105	MANDIRI
40	7324042008	USSU	MALILI	'0.7400	MAJU
41	7324042009	TARABBI	MALILI	'0.6087	BERKEMBANG
42	7324042010	BALANTANG	MALILI	'0.8378	MANDIRI
43	7324042011	ATUE	MALILI	'0.7467	MAJU
44	7324042012	PONGKERU	MALILI	'0.7541	MAJU
45	7324042013	PUNCAK INDAH	MALILI	'0.9381	MANDIRI
46	7324042014	PASI-PASI	MALILI	'0.7092	MAJU
47	7324042015	LAKAWALI PANTAI	MALILI	'0.8390	MANDIRI
48	7324052001	TAWAKUA	ANGKONA	'0.6425	BERKEMBANG
49	7324052002	TAMPINNA	ANGKONA	'0.7341	MAJU
50	7324052003	SOLO	ANGKONA	'0.7400	MAJU
51	7324052004	TARIPA	ANGKONA	'0.7295	MAJU
52	7324052005	MANTADULU	ANGKONA	'0.6411	BERKEMBANG
53	7324052006	BALIREJO	ANGKONA	'0.7819	MAJU
54	7324052007	MALIOWO	ANGKONA	'0.6849	BERKEMBANG
55	7324052008	LAMAETO	ANGKONA	'0.7335	MAJU
56	7324052009	WATANGPANUA	ANGKONA	'0.8024	MAJU
57	7324052010	WANASARI	ANGKONA	'0.7802	MAJU
58	7324062001	LAMPENAI	WOTU	'0.7081	MAJU

59	7324062002	TARENGGE	WOTU	'0.7714	MAJU
60	7324062003	MARAMBA	WOTU	'0.7038	BERKEMBANG
61	7324062004	CENDANA HIJAU	WOTU	'0.7433	MAJU
62	7324062005	BAWALIPU	WOTU	'0.8786	MANDIRI
63	7324062006	KALAENA	WOTU	'0.6114	BERKEMBANG
64	7324062007	LERA	WOTU	'0.7710	MAJU
65	7324062008	KANAWATU	WOTU	'0.6963	BERKEMBANG
66	7324062009	BAHARI	WOTU	'0.6254	BERKEMBANG
67	7324062010	KARAMBUA	WOTU	'0.6651	BERKEMBANG
68	7324062011	PEPURO BARAT	WOTU	'0.7041	BERKEMBANG
69	7324062012	BALO-BALO	WOTU	'0.6886	BERKEMBANG
70	7324062013	RINJANI	WOTU	'0.6086	BERKEMBANG
71	7324062014	TARENGGE TIMUR	WOTU	'0.6070	BERKEMBANG
72	7324062015	MADANI	WOTU	'0.6814	BERKEMBANG
73	7324062016	TABAROGÉ	WOTU	'0.6697	BERKEMBANG
74	7324072001	BURAU	BURAU	'0.8340	MANDIRI
75	7324072002	JALAJJA	BURAU	'0.8432	MANDIRI
76	7324072003	LEWONU	BURAU	'0.6552	BERKEMBANG
77	7324072004	LAMBARESE	BURAU	'0.6829	BERKEMBANG
78	7324072005	LAUWO	BURAU	'0.6256	BERKEMBANG
79	7324072006	BONE PUTE	BURAU	'0.7711	MAJU
80	7324072007	LUMBEWE	BURAU	'0.7465	MAJU
81	7324072008	MABONTA	BURAU	'0.6794	BERKEMBANG
82	7324072009	LARO	BURAU	'0.6165	BERKEMBANG
83	7324072010	BENTENG	BURAU	'0.7181	MAJU
84	7324072011	BATU PUTIH	BURAU	'0.6046	BERKEMBANG
85	7324072012	LANOSI	BURAU	'0.6194	BERKEMBANG
86	7324072013	LAGEGO	BURAU	'0.7541	MAJU
87	7324072014	CENDANA	BURAU	'0.6129	BERKEMBANG
88	7324072015	BURAU PANTAI	BURAU	'0.6260	BERKEMBANG
89	7324072016	ASANA	BURAU	'0.6314	BERKEMBANG
90	7324072017	KALATIRI	BURAU	'0.6500	BERKEMBANG
91	7324072018	LAMBARA HARAPAN	BURAU	'0.7019	BERKEMBANG
92	7324082001	BAYONDO	TOMONI	'0.7605	MAJU
93	7324082002	MULYASRI	TOMONI	'0.8189	MANDIRI
94	7324082007	LESTARI	TOMONI	'0.7465	MAJU
95	7324082008	KALPATARU	TOMONI	'0.7687	MAJU
96	7324082011	TADULAKO	TOMONI	'0.7668	MAJU

97	7324082012	BERINGIN JAYA	TOMONI	'0.8219	MANDIRI
98	7324082015	BANGUN JAYA	TOMONI	'0.8283	MANDIRI
99	7324082016	MANDIRI	TOMONI	'0.9014	MANDIRI
100	7324082017	SUMBER ALAM	TOMONI	'0.6403	BERKEMBANG
101	7324082018	UJUNG BARU	TOMONI	'0.7340	MAJU
102	7324082019	BANGUN KARYA	TOMONI	'0.7184	MAJU
103	7324082020	RANTE MARIO	TOMONI	'0.7497	MAJU
104	7324092001	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR	'0.7521	MAJU
105	7324092002	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	'0.7671	MAJU
106	7324092003	PURWOSARI	TOMONI TIMUR	'0.7168	MAJU
107	7324092004	PATTENGKO	TOMONI TIMUR	'0.7451	MAJU
108	7324092005	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR	'0.7443	MAJU
109	7324092006	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR	'0.7468	MAJU
110	7324092007	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR	'0.6721	BERKEMBANG
111	7324092008	CENDANA HITAM TIMUR	TOMONI TIMUR	'0.6978	BERKEMBANG
112	7324102001	KALAENA KIRI	KALAENA	'0.9330	MANDIRI
113	7324102002	SUMBER AGUNG	KALAENA	'0.7557	MAJU
114	7324102003	PERTASI KENCANA	KALAENA	'0.7711	MAJU
115	7324102004	NON BLOK	KALAENA	'0.7767	MAJU
116	7324102005	ARGOMULYO	KALAENA	'0.7048	BERKEMBANG
117	7324102006	SUMBER MAKMUR	KALAENA	'0.7640	MAJU
118	7324102007	MEKAR SARI	KALAENA	'0.7762	MAJU
119	7324112001	LEDU LEDU	WASUPONDA	'0.7602	MAJU
120	7324112002	KAWATA	WASUPONDA	'0.7625	MAJU
121	7324112003	TABARANO	WASUPONDA	'0.8029	MAJU
122	7324112004	WASUPONDA	WASUPONDA	'0.8097	MAJU
123	7324112005	PARUMPANAI	WASUPONDA	'0.7722	MAJU
124	7324112006	BALAMBANO	WASUPONDA	'0.7370	MAJU

(Sumber Data:Dinas PMD Kab. Luwu Timur Tahun 2024)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Indeks Desa Membangun Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju	2021	Berkembang	0,6727
		2022	Berkembang	0,7031
		2023	Maju	100

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

(Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Desa Membangun	Maju	Berkembang	Maju	Maju	Maju	-	Maju	-	Maju	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan berkelanjutan adalah :**

- Peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa;
- Pengembangan potensi desa menjadi desa wisata yang menarik pengunjung sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;
- Tata kelola keuangan desa yang lebih baik melalui Dana Desa yang meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.

- ❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan :**

- ✓ Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, sistem administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa;
- ✓ Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga;
- ✓ Melaksanakan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa;

- ✓ Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Penataan Desa
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- ✓ Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- ✓ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Program Pemberdayaan Sosial
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp. 1.123.546.830 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.020.632.700 atau 90,84 dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9,16%. Artinya realisasi anggaran terserap dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja sehingga penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pemberdayaan Gender

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,00	90,96	101,07%
Rata-Rata Capaian Kinerja			101,07%		

Indikator Kinerja “*Indeks Pembangunan Gender*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$$

/

Untuk Indikator *Indeks Pembangunan Gender* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,00 dan realisasi capaian kinerja sebesar 90,96 dengan persentase capaian sebesar

101,07%, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan untuk pembangunan gender. Jika dibandingkan tahun lalu dengan realisasi kinerja sebesar 90,34 dengan persentase capaian kinerja 100,44%, menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja sebesar 0,62% dan capaian kinerja sebesar 0,63% untuk tahun 2023.

Indikator ini merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026,. Adapun tabel capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
TAHUN 2020-2023**

Kode	Kabupaten/Kota	IPG (UHH LF SP2020)			
		2020	2021	2022	2023
7300	SULAWESI SELATAN	93,02	93,04	93,45	93,56
7301	Kepulauan Selayar	91,74	91,60	91,81	92,18
7302	Bulukumba	96,45	96,02	96,23	96,41
7303	Bantaeng	95,78	95,74	95,32	95,37
7304	Jeneponto	91,69	91,87	92,36	92,78
7305	Takalar	87,69	87,55	87,74	88,10
7306	Gowa	87,54	87,75	88,26	88,87
7307	Sinjai	98,16	97,97	98,24	98,30
7308	Maros	89,37	89,32	89,63	89,84
7309	Pangkajene dan Kepulauan	89,96	90,08	90,68	90,87
7310	Barru	95,57	95,56	95,65	95,72
7311	Bone	93,00	92,80	93,34	93,49
7312	Soppeng	97,47	97,58	97,42	97,49
7313	Wajo	90,36	90,52	90,38	90,86
7314	Sidenreng Rappang	92,55	92,75	93,10	93,20
7315	Pinrang	95,79	95,87	96,10	96,37
7316	Enrekang	97,78	97,79	98,37	98,43
7317	Luwu	92,24	92,66	92,92	93,05
7318	Tana Toraja	88,33	88,77	88,89	89,03
7322	Luwu Utara	89,29	89,50	90,14	90,55
7325	Luwu Timur	90,10	90,21	90,83	90,96
7326	Toraja Utara	87,57	87,56	88,14	88,70
7371	Kota Makasar	95,33	95,35	95,44	95,50
7372	Kota Parepare	97,47	97,34	97,45	97,77
7373	Kota Palopo	97,71	97,72	98,08	98,13

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 Adapun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	2021	89,80	99,87%
		2022	90,34	100,44%
		2023	90,96	101,07%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Indeks Pembangunan Gender- (IPG)	89,94	90,34	90,00	90,96	90,05	-	91,18	-	92,15	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pencapaian sasaran:**

- ✓ Pembentukan TIM Pokja Pengarusutamaan Gender;
- ✓ Melakukan sinergitas dengan dunia usaha dan Peran organisasi Masyarakat.

- ❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur lebih optimal. Di bentuknya Tim Pokja Pengarusutamaan Gender juga berperan penting dalam

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimulai dari Perencanaan, Penyediaan Anggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- ✓ Program Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- ✓ Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- ✓ Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.3.110.299.169 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.3.033.321.749 atau 97,53% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,47%. Realisasi penggunaan anggaran yang cukup tinggi dengan realisasi kinerja yang mencapai target bahkan melebihi dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang disediakan pada indikator ini cukup efektif dan tepat sasaran.

Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas**”. Untuk mencapai misi 2, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal & PTSP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	1,98	1,19	60,10%
Rata-Rata Capaian Kinerja			60,10%		

A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah :

$$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n)} \times 100\%}{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n-1)}}$$

Untuk indikator kinerja *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 1,98 % dan realisasi sebesar 1,19% dengan persentase capaian kinerja sebesar 60,10%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2023 tidak tercapai atau adanya kegagalan capaian kinerja pada indikator ini. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2022 sebesar -1,84, artinya terjadi peningkatan capaian

kinerja tahun 2023 yang sangat drastis, walaupun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan menurut lapangan usaha diukur berdasarkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor unggulan dapat dilihat pada tabel angka A dibawah ini :

Tabe Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F	Konstruksi/Construction	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27

Laju pertumbuhan produk domestik bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 30,70 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,30%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Konstan 2010, mencapai 17,93 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi percepatan ekonomi sebesar 9,66 persen.

Laju pertumbuhan PDRB 2023 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,51% , nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 9,66% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 13.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (%), 2019-2023
Figures *Economic Growth of Luwu Timur Regency and Sulawesi Selatan Province (%), 2019-2023*



Sumber/Source : BPS - Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Statistics Indonesia - Based on census, surveys and others sources

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2021	4,19	-
		2022	-1,84	-100,55%
		2023	1,19	60,10%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,83	-1,84	1,98	1,19	2,08	-	2,17	-	2,23	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Seluruh Komoditi pada sektor pertanian menurun :
 - Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah;
 - Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2023 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah);
 - Adanya penurunan populasi dalam kurung waktu 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa factor :
 - a. Beberapa kasus penyakit yang menyerang ternak khususnya pada reproduksi ternak yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan;
 - b. Pendataan ternak yang tidak maksimal disetiap desa yang memiliki populasi ternak;
 - c. Identifikasi ternak yang keluar dan masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur tidak terpantau dengan baik, karena tidak Adanya pemantauan pada pos perbatasan wilayah Kab. Luwu Timur (Pos Tambangan, Lauwo dan Lampia);
 - d. jenis-jenis penyakit yang baru muncul pada ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Merebaknya wabah penyakit African Swine Fever (ASF) pada ternak babi yang mematikan pada awal hingga pertengahan tahun 2023 yang berdampak pada banyaknya ternak babi yang mati atau dipotong untuk menghindari kerugian sehingga populasi ternak babi menurun 93,56% akan tetapi Sebagian besar ternak jenis lain

- telah di atasi melalui kegiatan Pengunggulungan maupun pengobatan oleh medik veteriner (dokter hewan) dan petugas teknis peternakan;
- e. Faktor kelahiran dan pemasukan ternak jumlahnya menurun dan dampak dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2022 dan kewaspadaan jembrana sehingga banyak peternak yang menjual ternak ke pedagang untuk dipotong atau dijual keluar wilayah Luwu Timur. Faktor lainnya adalah produktivitas sapi dan kerbau yang menghasilkan anak 1 ekor dalam satu tahun jika normal, dan kenyataannya dilapangan bisa menjadi lebih lama yaitu 2 anak dalam 3 tahun karena faktor genetik, cara pemeliharaan dan kesehatan ternak;
 - f. Populasi ayam ras pedaging (broiler) yang jumlahnya menurun sangat drastis sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini karena para peternak banyak gulung tikar dikarenakan harga operasional produksi yang terus naik.
- Ketersediaan saprodi seperti pupuk yang masih terbatas dan terlambat pasokannya sehingga mempengaruhi ketepatan jadwal penggunaan dan aplikasi pupuk pada tanaman padi;
 - Infrastruktur irigasi masih ada yang belum maksimal mengalir areal persawahan sehingga beberapa lahan tidak dapat ditanami dan ada lahan sawah lambat ditanami karena aliran air belum tersedia;
 - Tingginya biaya saprodi (keterbatasan modal usaha) sehingga petani tidak dapat memaksimalkan penggunaan saprodi sesuai anjuran;
 - Terbatasnya alat pasca panen seperti mesin panen (*Combine Harvester*) dan *Power thresher* (mesin perontok padi), karena penggunaan alat-alat tersebut dapat menekan kehilangan (*losses*) pada saat panen yang nantinya dapat mempengaruhi produksi padi;
 - Luas areal tanam jagung menurun disebabkan kurangnya bantuan benih dan saprodi lainnya (harga yang cukup tinggi);
 - Mayoritas petani hanya mau menanam benih varietas tertentu yang sesuai dengan spesifikasi lokasi, karena sangat mempengaruhi jumlah saprodi yang harus disediakan dan produksi yang dihasilkan;

- Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah;
- Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2023 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah).

❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan:**

- ✓ Konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan jadwal tanam hasil tudang sipulung untuk memutus mata rantai perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- ✓ Penyediaan bantuan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN seluas 16.378 Ha dan bantuan mandiri benih padi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.000 Ha;
- ✓ Untuk memenuhi kebutuhan benih yang spesifik lokasi, maka yang perlu dilakukan adalah memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal (Instalasi Kebun Benih Milik Pemda Kab. Luwu Timur di Desa Teromu Kec. Mangkutana);
- ✓ Pengadaan belerang melalui APBD II Kab. Luwu Timur yang dapat digunakan untuk pengendalian OPT pra tanam;
- ✓ Mendorong dan memfasilitasi petani untuk memnafatkan asuransi pertanian memberi rasa aman dan mencegah tingkat kerugian yang lebih banyak bila mengalami musibah kekeringan, banjir atau kegagalan panen akibat serangan hama;
- ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk subsidi;
- ✓ Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya petani dan penyuluh pertanian melalui pelatihan, bimbingan dan pendampingan;
- ✓ Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui Pembangunan Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani;

- ✓ Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
 - ✓ Pemanfaatan Alsintan khususnya Combine Harvester (alat panen) untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen;
 - ✓ Harga gabah yang cukup tinggi sehingga mendorong minat petani untuk menambah areal tanam dan memberikan dampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani;
 - ✓ Penyediaan alokasi alat dan mesin pertanian seperti alat pemipil jagung (Corn Sheller) melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk bersubsidi;
 - ✓ Memfasilitasi alokasi bantuan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Melakukan pendampingan intensif kepada para petani untuk terus menerapkan praktek budidaya yang baik;
 - ✓ Mendorong kegiatan intensifikasi melalui bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II, serta selalu memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan pupuk alternatif dari hasil pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik;
 - ✓ Untuk penanganan jangka menengah/Panjang, dilakukan upaya peremajaan tanaman terhadap tanaman-tanaman yang sudah tua/rusak.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - ✓ Program Penyuluhan Pertanian;
 - ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;

- ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - ✓ Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - ✓ Program Pengelolaan Budidaya Perikanan
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.49.097.654.415 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.46.320.475.325,34 atau 94,34% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,66%. Dengan melihat realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada indikator ini cukup efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil capaian yang diperoleh.

Sasaran Strategis 5

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN LAPANGAN USAHA* dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	5,42	56%
Rata-Rata Capaian Kinerja			56%		

Indikator Kinerja “*Tingkat Pengangguran Terbuka*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{8.521}{157.300} \times 100 \% \\
 &= 0,055 \times 100 \\
 &= 5,42
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Luwu Timur, target kinerja tahunan untuk tahun 2023 adalah 3,05%, adapun realisas kinerja adalah 5,42% dengan persentase capaian kinerja sebesar 56%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai atau angka pengangguran terbuka masih besar dan belum sepenuhnya terserap

oleh pangsa pasar kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja sebesar 3,30% dengan realisas kinerja sebesar 4,48% dengan persentase capaian sebesar 74%, terjadi pergerakan atau pergeseran target yang cenderung menurun. Namun secara keseluruhan capaian realisasi target dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan atau adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dengan melihat jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja yang mengalami peningkatan dari 7.230 jiwa tahun 2022 menjadi 8.521 jiwa untuk tahun 2023.

Angkatan kerja adalah (Labor Force) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran berarti menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan seluruh Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

URAIAN KETENAGAKERJAAN	JUMLAH
Penduduk Usia Kerja	227.135 orang
Angkatan Kerja	157.300 orang
▪ Bekerja	148.779 orang
▪ Tidak Bekerja	8.521 orang
Bukan Angkatan Kerja	69.835 orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,25%

(sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	1,10	2,44	2,81	1,49	1,98
Bulukumba	3,06	3,42	3,14	1,26	1,31
Bantaeng	3,65	4,27	4,07	2,72	3,71
Jeneponto	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13
Takalar	3,78	4,16	3,93	2,63	3,58
Gowa	4,35	6,44	4,30	3,26	3,43
Sinjai	2,17	2,65	2,61	1,80	1,69
Maros	4,42	6,28	6,30	5,04	3,64
Pangkajene	4,99	5,18	5,86	5,23	5,05
Barru	5,39	6,39	6,74	5,32	5,89
Bone	3,01	3,20	4,15	2,27	2,88
Soppeng	3,24	4,42	3,92	3,40	4,34
Wajo	3,00	4,33	4,32	2,54	2,10
Sidrap	4,35	5,91	4,93	3,56	3,29
Pinrang	2,91	4,19	4,06	2,79	3,64
Enrekang	2,15	2,44	2,34	0,58	1,53
Luwu	4,38	4,94	4,80	3,85	3,70
Tana Toraja	2,55	2,60	3,09	2,32	3,37
Luwu Utara	2,76	3,01	3,91	2,81	2,63
Luwu Timur	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42
Toraja Utara	2,86	3,17	2,61	1,99	2,60

Sumber Data : (BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2021	4,96	42%
		2022	4,48	74%
		2023	5,42	56%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	4,48	3,05	5,42	2,80	-	2,55	-	2,30	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran indikator kinerja:**

- ✓ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan setiap tahunnya yang dipengaruhi juga oleh meningkatnya Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2023;
 - ✓ jumlah pekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.
- ❖ **Alternative/solusi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja :**
- ✓ salah satu strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi agar para pencari kerja dan tenaga kerja dapat bersaing dalam dunia kerja serta mengoptimalkan penyebaran informasi bursa kerja. diharapkan pula agar Perusahaan yang melakukan penerimaan dan penempatan tenaga kerja agar terus melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. selain itu, meningkatnya investasi juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga perlu adanya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan investasi di kabupaten Luwu Timur.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Pelatiha Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Outputnya adalah jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
 - a. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, adapun output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang dari target 60 orang (100%) dan Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 110 orang dari target 110 orang (100%) dan Jumlah Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang dari target 16 orang (100%).
 - ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya adalah jumlah penempatan tenaga kerja.
 - a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja.

Sub Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.

b. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Output kegiatan ini ada 2 (dua), yaitu pertama jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan. Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi manajemen usaha maupun SDM. Kedua adalah jumlah kelompok kerja terampil yang didampingi dan difasilitasi, kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri.

▪ Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a. Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 116 Info Loker dari target 116 info loker (110%).

▪ Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI), indikator dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi. Tahun 2023 tidak ada tenaga kerja indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan.

✓ Program Hubungan Industrial

▪ Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%).

▪ Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota, output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas, realisasi 3 kasus dari target 3 kasus (100%)
 - b. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 30 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 30 kasus atau dengan tingkat capaian 100%;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, ouput dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%);
 - e. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2024 dengan besaran Rp. 3.531.561,-
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.2.129.549.655 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.2.107.351.831 atau 98,96 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,04%. Artinya realisasi penggunaan anggaran yang cukup tinggi, tetapi tidak diikuti dengan keberhasilan pencapaian target kinerja tahunan.

Misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas”** dengan tujuan **“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah Secara Berkelanjutan ”**. Untuk mencapai misi 3, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis *“ MENINGKATNYA DAYA GUNA DAN HASIL GUNA INFRASTRUKTUR DAERAH ”* dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	74,93	84,27	112,46
Rata-Rata Capaian Kinerja			112,46%		

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh realisasi persentase Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur :

Nilai IKM terhadap layanan infrastruktur dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap jumlah unsur yang dinilai, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan layanan Infrastruktur terhadap sejumlah X unsur yang dikaji, maka setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji

$$IKLI = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Layanan x 25

Variabel unsur yang dinilai dalam IKLI antara lain meliputi : Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas,,Penyediaan Transportasi (Darat,ASDP,Laiut dan Udara), Penyediaan Infrastruktur Air Bersih; Penyediaan;Penyediaan Irigasi (pertanian dan air baku);penyediaan infrastruktur perumahan.

((Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (665,01) / panjang seluruh jalan kabupaten (2.229,869) x 90% + Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik (380) / jumlah total jembatan kabupaten (392) x 10%) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (3.815,4) / luas irigasi kabupaten (6.788) x 40% + Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (98,00) / Panjang seluruh saluran irigasi kabupaten (142,48) x 35% + Panjang sungai kabupaten dalam kondisi baik(0) / panjang total sungai (0) x 20% + Panjang pantai kabupaten dalam kondisi baik (0) / panjang total pantai (0) x 5%) + (Jumlah Penduduk berakses air minum (190.475) / jumlah penduduk (311.062) x 40% + Jumlah rumah tinggal bersanitasi (94.162) / jumlah rumah tinggal (95.902) x 15% + Jumlah bangunan dalam kondisi baik (37) / jumlah bangunan(41) x 45%) + (Luas areal permukiman tertata (48,85) / luas areal permukiman keseluruhan(58,54) x 35% + Luas permukiman kumuh yang ditangani (2,20) / luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani(95) x 35% + Jumlah rumah layak huni (59.430) / jumlah total rumah(66.564) x 30%) + (Jumlah perlengkapan jalan yang ada (16.202) / jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada(45.831) x 100% + Jumlah prasarana perhubungan yang ada (9,7232) / jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada(13) x 100%) / 2 + (Jumlah cakupan koneksi internet pada desa dan kelurahan (0) / jumlah desa dan kelurahan(127) x 100%) + Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik (19) / jumlah ruang publik (19) x 100% + Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD (41) / Jumlah OPD (41) x 100%) / 3))/6

$$= (665,01 / 2.229,869 \times 90\%) + (380 / 392 \times 10\%) + (3.815,4 / 6.788 \times 40\%) + (98,00 / 142,48 \times 35\%) + (0 / 0 \times 20\%) + (0 / 0 \times 5\%) + (190,475 / 311.062 \times 40\%) + (94.162 / 95.902 \times 15\%) + (37 / 41 \times 45\%) + (48,85 / 58,54 \times 35\%) + (2,20 / 95 \times 35\%) + (59.430 / 66.564 \times 30\%) + (16.202 / 45.831 \times 100\%) + (9,7232 / 13 \times 100\% / 2) + (0 / 127 \times 100\%) + (19 / 19 \times 100\%) + (41 / 41 \times 100\% / 3) / 6$$

$$= (26,84) + (9,69) + (22,48) + (24,07) + (0) + (0) + (0,024) + (14,72) + (40,60) + (29,20) + (0,81) + (26,78) + (35,35) + (74,79) + (0) + (100) + (100) / 6$$

$$= 505,57 / 6$$

$$= 84,27$$

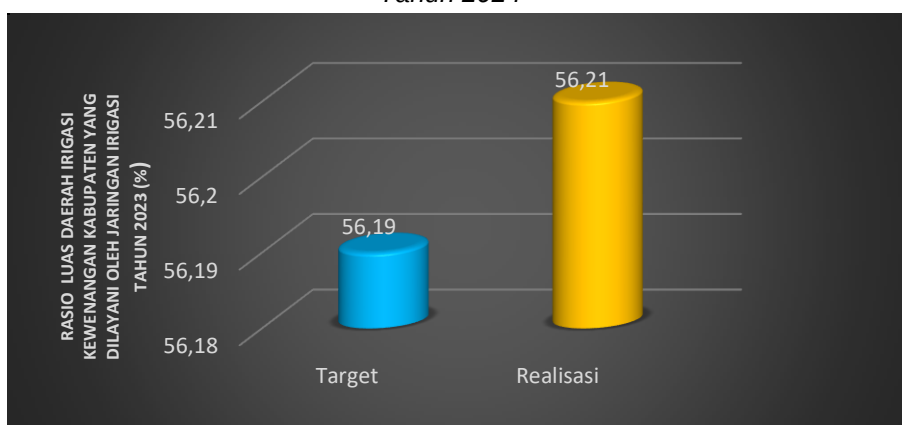
Untuk Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 74,93% dan realisasi kinerja sebesar 84,27% dengan persentase capaian kinerja 112,46%, hal menunjukkan bahwa target dapat dicapai atau keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana *indeks pembangunan infrastruktur* yang ditargetkan sebesar 74,89 dan realisasi kinerja 58,21 dengan persentase capaian kinerja 77,73%, artinya terjadi peningkatan capaian kinerja..

Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



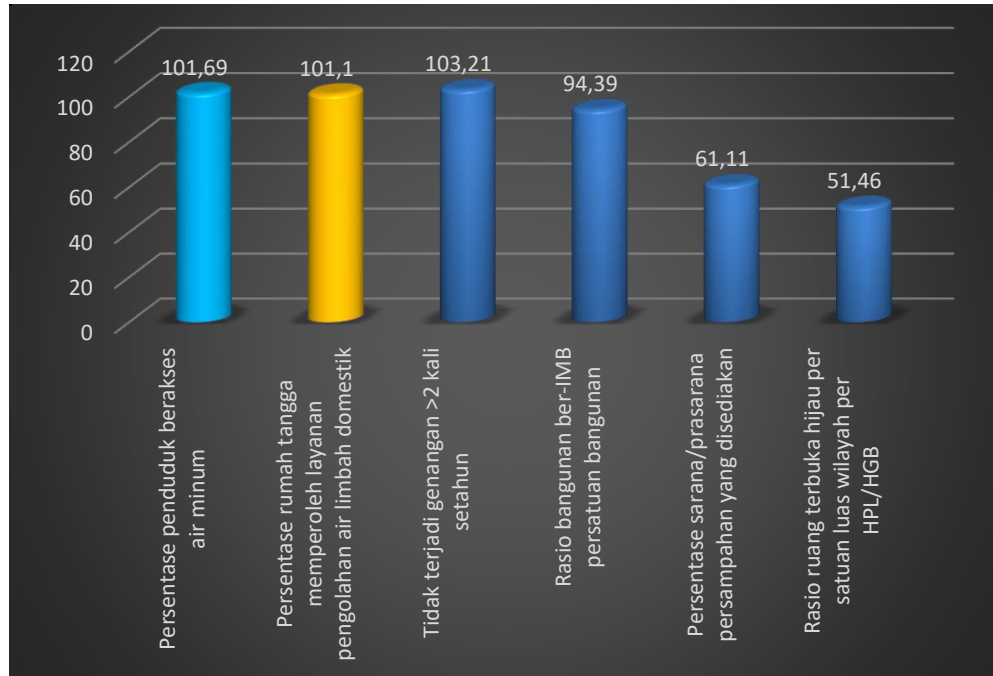
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024



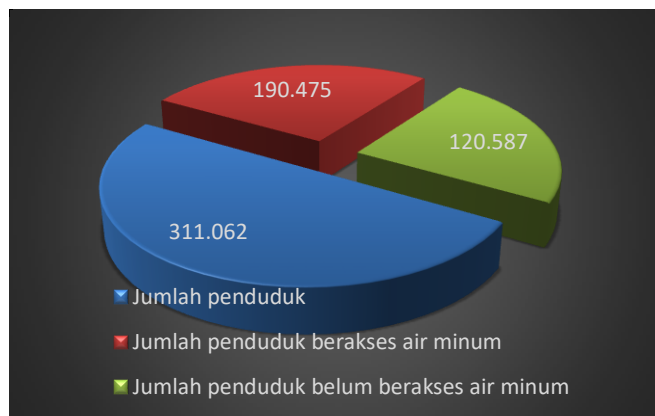
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

Cakupan indikator sasaran Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2023



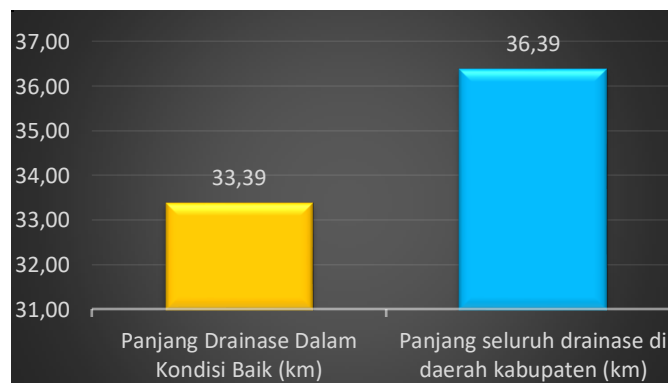
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2023



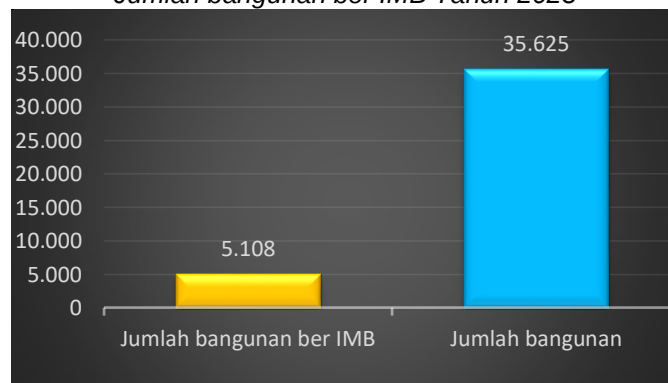
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2023



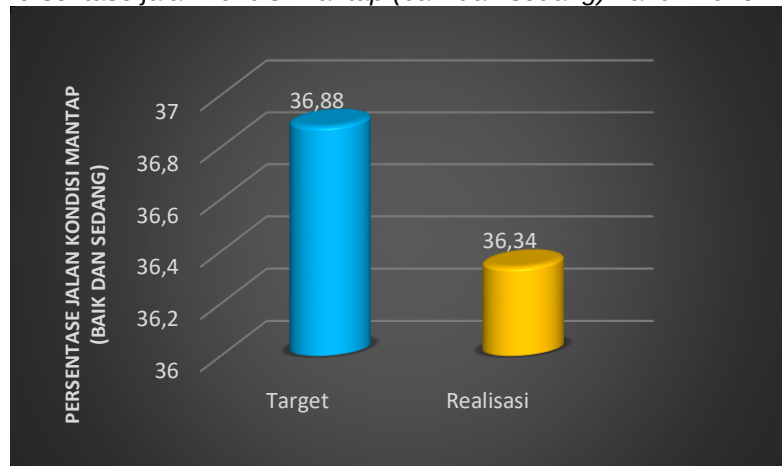
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2019 - 2023

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil
Tahun 2019	39,717	3,653	11,565
Tahun 2020	28,029	3,4631	27,391
Tahun 2021	8,56	5,16	72,69
Tahun 2022	8,94	5,78	32,07
Tahun 2023	9,00	1,00	24,08

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2023



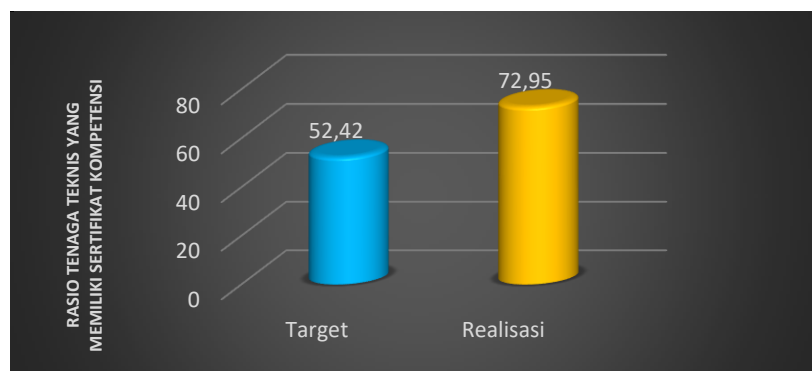
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit) Tahun 2019 - 2023

Tahun	Pembangunan jembatan	Pemeliharaan jembatan
Tahun 2019	8 unit	3 unit
Tahun 2020	4 unit	3 unit
Tahun 2021	7 unit	3 unit
Tahun 2022	8 unit	4 unit
Tahun 2023	16 unit	4 unit

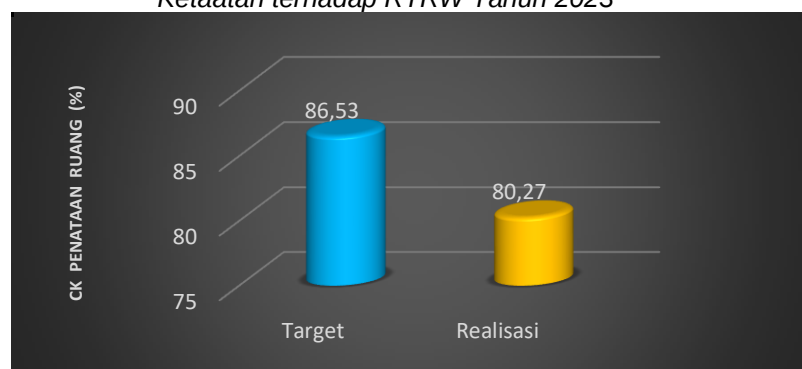
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2024

Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Nilai Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	2022	58,21	77,73%
		2023	84,27	112,46

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,89	58,21	74,93	84,27	75,15	-	75,32	-	75,59	-

- ❖ **Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU semakin bertambah;
- ✓ Adanya anggaran yang bersumber dari Dana DAK
- ✓ Adanya anggaran yang masuk bersumber dari dana BKK Provinsi;
- ✓ Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur;
- ✓ Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge;
- ✓ pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pemasangan Marka sepeda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kec. Malili yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, selain itu rambu lalu lintas sebagai peringatan dan tanda bagi para pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan roda dua, ataupun kendaraan roda empat dan titik penempatan rambu sesuai dengan harmonisasi yang diatur
- ✓ pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana LLAJ berupa pemeliharaan perlengkapan jalan, pemeliharaan halte bus sekolah serta pemeliharaan 3 unit terminal yang ada di Dinas

Perhubungan dilaksanakan secara rutin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna sarana dan prasarana LLAJ;

❖ **Alternative/ Solusi yang akan dilakukan :**

- ✓ Semua ruas jalan akan dilengkapi PJU sesuai target kinerja;
- ✓ Mempercepat proses Pelaksanaan Barang dan Jasa;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti.
- ✓ Meningkatkan kesadaran dari semua pihak dalam menangani permasalahan yang ada khususnya dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan membentuk tim koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi;
- ✓ Melakukan inovasi dalam efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat yang dicapai.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
- ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.

- ✓ Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan.
- ✓ Program Pengembangan Perumahan
 - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah susun dan Rumah Khusus
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota.
- ✓ Program Kawasan Permukiman
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah sepuluh Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni;
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian.
- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- ✓ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.188.030.375.860 dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.173.149.748.170,29 atau 92,09% dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 7,91%. Daya serap dan efisiensi anggaran yang cukup baik dengan keberhasilan mencapai target, artinya penggunaan anggaran yang cukup baik dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 7

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA* ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	88,10	80,09	90,91 %
2.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (tinggi)	152,28	133%
Rata-Rata Capaian Kinerja			111.96%		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU dan IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

- IKLH Nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL
- IKLH Provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA, IKU dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan (Nilai dan Raport IKLH Kabupaten/Kota) sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kab/Kota} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.6 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Permen KLHK Nomor 27 Tahun 2021

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 66,25) + (0,405 \times 95,97) + (0,219 \times 74,46) \\
 &= (24,91) + (38,87) + (16,31) \\
 &= 80,09
 \end{aligned}$$

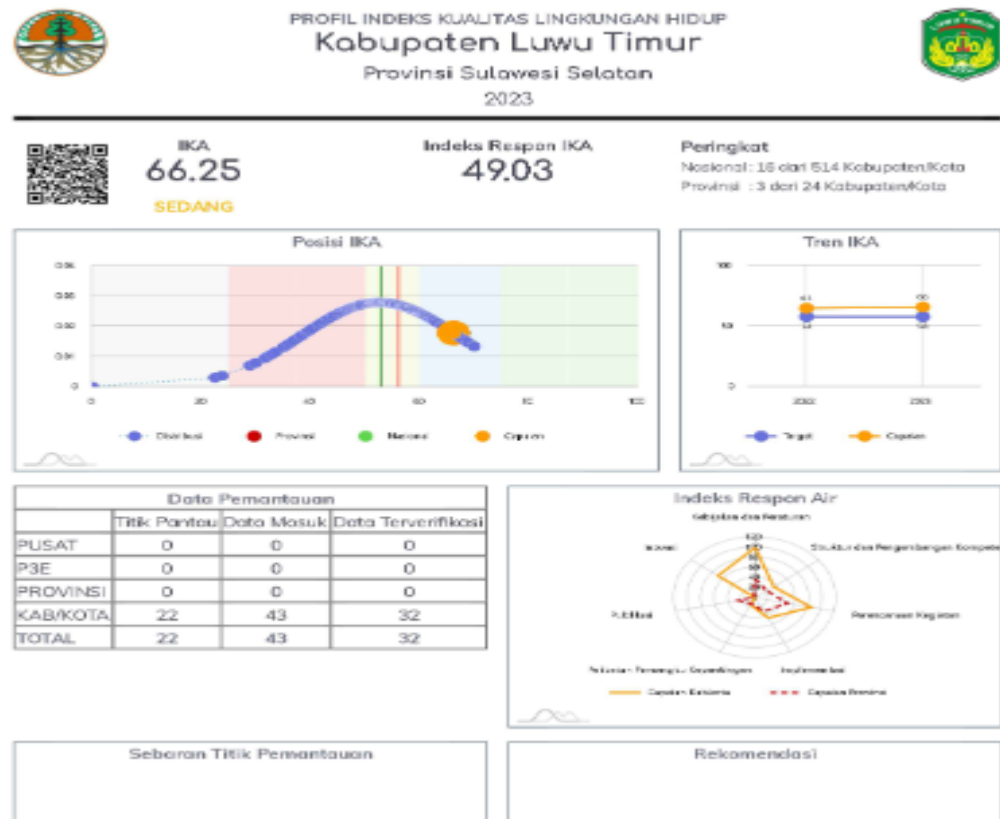


Untuk Indikator kinerja tahunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur, target kinerja tahun 2023 sebesar 88,10 dan realisasi capaian target kinerja adalah sebesar 80,09% dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai, namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja tahunan sebesar 87,55%

dengan realisasi capaian kinerja sebesar 79,71%, artinya terjadi peningkatan realisasi kinerja IKLH Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,38%. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu

Timur, dan adapun capaian indikator IKLH Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

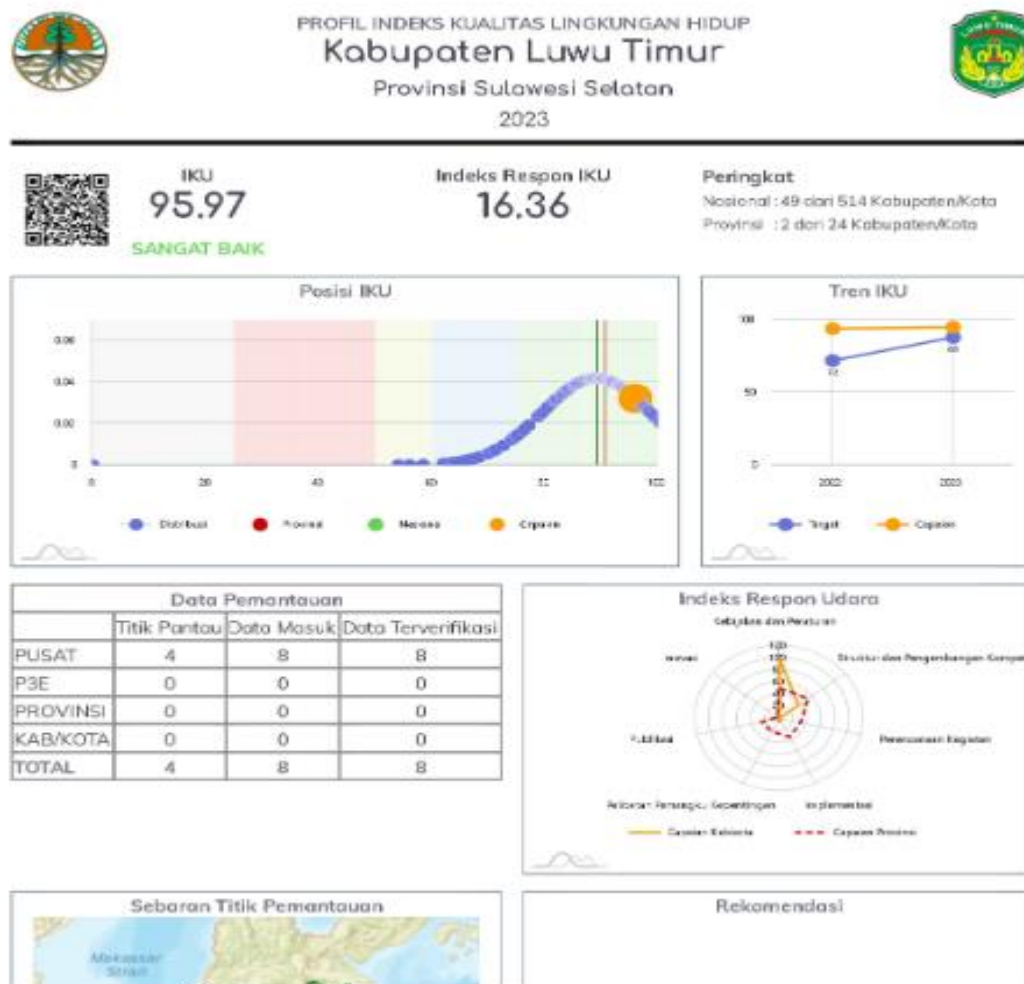
Gambar 1.1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2022 sebesar 66,52 maka nilai IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,27 poin. Nilai IKA memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2022 yaitu kategori **Sedang**.

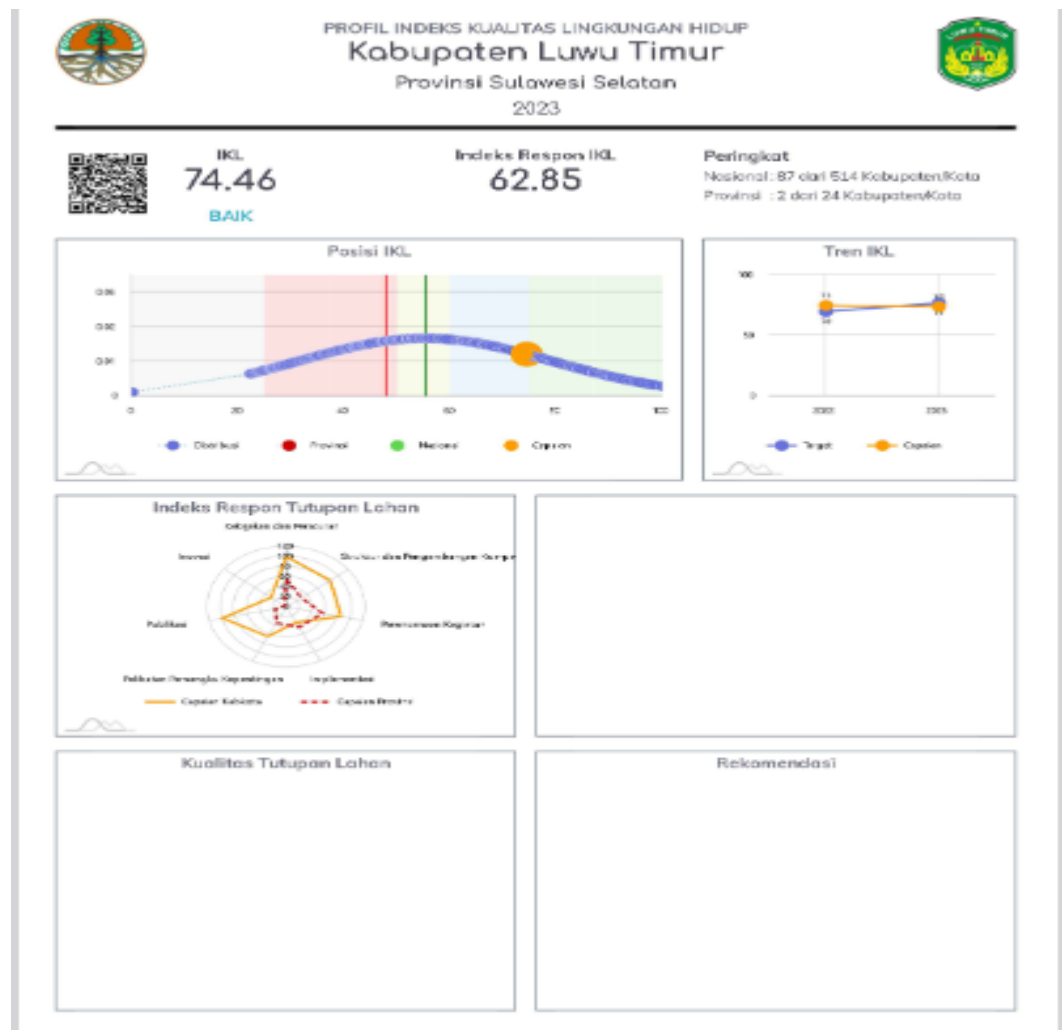
Gambar 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2022 sebesar 94,27 maka nilai IKU Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,7 poin. Nilai IKU memang mengalami peningkatan karena nilai IKU Kabupaten Luwu Timur masuk dalam kategori **sangat baik**.

Gambar 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



(Sumber Data : <https://ppki.menink.go.id/ikln>, 2023)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2022 sebesar 75,45 maka nilai IKL Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,99 poin. Nilai IKL memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2022 yaitu kategori **Baik**.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKLH Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	2021	84,08	139,21
		2022	79,71	91,05
		2023	80,09	90,91

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87,55	79,71	88,10	80,09	88,35	-	88,70	-	88,70	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

- Penyebab tidak tercapainya target atau turunnya realisasi dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Pembagian kewenangan antara Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam pengawasan, penerapan sanksi dan penerbitan izin lingkungan;
 - b. Kewenangan Pemberian sanksi mengikuti tempat diterbitkannya Persetujuan Lingkungan;
 - c. Lokasi Penanaman Rehabilitasi DAS IPPKH vegetasinya terlalu rapat sehingga bibit pohon yang ditanam kurang mendapatkan sinar matahari sehingga persentase tumbuhnya kurang maksimal. & juga Terdapat penebangan liar dilokasi tersebut dan merusak tanaman yang ditanam;

- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Perbup PPMHA masih dalam tahap proses perbaikan dan verifikasi dan akan di jadwalkan Kembali oleh Bagian Hukum;
 - e. Kurangnya pemahaman calon sekolah Adiwiyata Kabupaten terkait gerakan PBLHS dan dalam penyusunan dokumen PBLHS;
 - f. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintah Desa terkait Program Kampung Iklim;
 - g. Pemilik Izin Pengelolaan Limbah B3 belum rutin melaporkan neraca pengelolaan limbah B3 per triwulan;
 - h. Banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal dan jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transportasi melonjak;
 - i. Volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah dan keterbatasan petugas kebersihan sehingga tidak mampu untuk mengangkut semua sampah ygdihasilkan per hari;
 - j. kendaraan pengangkut sampah sebagian besar sudah tua, sehingga sering mengalami kerusakan;
 - k. Kurangnya SDM serta sarana & prasarana laboratorium;
 - l. Kondisi Sebagian Peralatan Pengujian di Laboratorium Sudah Rusak
- Alternative solusi yang telah dilakukan untuk keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja :
- a. Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industry dll;
 - b. 'Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL;
 - c. Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau;

- d. Memperbaharui data Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur seperti Ruang Terbuka Hijau maupun Tutupan Vegetasi yang lainnya. Diharapkan pembaharuan data;
- e. Koordinasi dan pelaporan hasil-hasil pengawasan, penanganan pengaduan, penerbitan sanksi dan penerbitan izin lingkungan dengan KLHK;
- f. Melakukan pemantauan rutin dan Kerjasama dengan stakeholder terkait (KPH Larona, Camat Towuti dan Desa Lioka) untuk Rehabilitasi DAS IPPKH;
- g. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh sekolah yang ada di Kab. Luwu Timur melalui Kerjasama DLH, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Luwu Timur terkait gerakan PBLHS dan dalam penyusunan dokumen PBLHS;
- h. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada Masyarakat & pemerintah terkait kampung iklim;
- i. Upayakan Mobil pengangkut sampah menjemput di bank sampah unit agar bank sampah tetap aktif dan regulasi perputaran uang untuk hasil penjualan sampah lebih ditingkatkan;
- j. Diperlukan sosialisasi, pelatihan & dukungan teknis dari terhadap pelaku usaha/kegiatan penghasil LB3;
- k. Tingkatkan sarana dan prasarana laboratorium serta Tambahkan personal laboratorium dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :**

- 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota :
 - Sub Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- c. Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) :
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

B. Indikator Kinerja “Indeks Resiko Bencana”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

$$R = H \times \frac{V}{C}$$

Dimana :

R = Risk (Risiko)

H = Hazar (Bahaya)

V = Vulnerability (kerentanan)

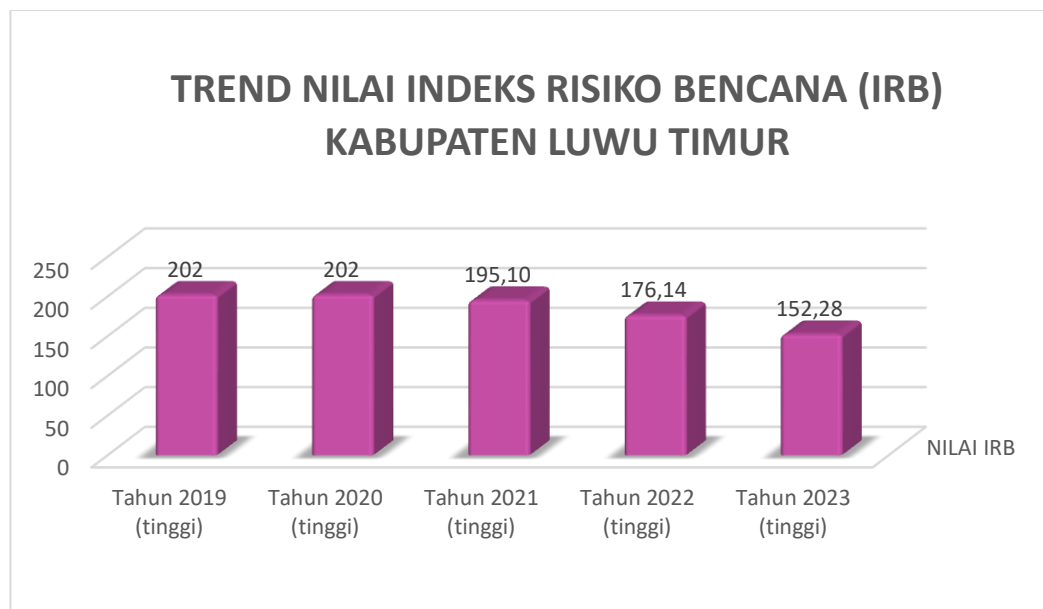
C = Capacity (Kapasitas)

Untuk indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) Luwu Timur pada tahun 2023, ditargetkan dengan nilai 202 (tinggi) dan realisasi target kinerja menurun menjadi 152,28 (risiko tinggi) dengan persentase capaian kinerja sebesar 133%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan nilai 202 (tinggi) dengan realisasi kinerja 176,14 (resiko tinggi), IRB tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui BPBD untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”**. Semakin kecil nilai IRBI berarti semakin baik, IRBI yang turun merupakan indikasi adanya investasi di bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Program penanggulangan bencana dapat mengurangi risiko. **IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. **Komponen bahaya** adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. **Komponen kerentanan** adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara **komponen kapasitas** adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota.

Adapun Trend Nilai Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :



(Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun Kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	2021	195.10	-
		2022	182.45	111%
		2023	152,28	133%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	176.14	202	152,28	202	-	202	-	202	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

- Penyebab tercapainya target atau turunnya tingkat resiko bencana dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Adanya pelaksanaan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam rangka penurunan Nilai IRB;
 - b. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Adanya peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait kebencanaan dari OPD terkait;
 - e. Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - f. Penanggulangan bencana telah menjadi program prioritas kepala daerah yaitu Mitigasi Bencana.
- Alternative solusi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Forum Group Discussion Penilaian Indeks Ketahanan Daerah sesuai timeline ;
- c. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data pendukung dari OPD terkait dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah untuk memaksimalkan Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana;

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

a. Program Penanggulangan Bencana:

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit.
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- c. Program Penanganan Bencana
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.8.106.397.414 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.7.006.205.588,68 atau 86,43% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 13,57%. Jika disimpulkan realisasi penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja bahwa anggaran yang disediakan digunakan dengan cukup efektif dan efisien.

Misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani”**. Untuk mencapai misi 4, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan, Perhubungan, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Pertanian dan Bapelitbangda.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN*” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	A	A (78,438)**	100
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB(71,00)	B(66,51)	93,68
Rata-Rata Capaian Kinerja			96,84%		

Catatan : **): angka sementara

A. Indikator Kinerja “*Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri tentang IPKD

Untuk indikator *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)* pada tahun 2023 ditargetkan predikat A dan realisasi kinerja dengan predikat A (78,438)** (untuk angka

sementara), karena penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan belum ada dirilis sampai dengan saat ini, yang kemudian nilainya akan dirilis pada akhir tahun 2024. Untuk tahun 2021 nilai IPKD Luwu Timur sebesar 80,1614, sementara tahun 2022 sebesar 78,438, artinya terjadi penurunan capaian kinerja IPKD dari tahun 2021 ke 2022. Namun untuk perbandingan capaian IPKD tahun 2023 belum ada karena masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun tabel Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan
Klaster Sedang
Tahun Anggaran 2021

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1.	Luwu Timur	14,988	19,1379	11,1207	15	4,9150	15	80,1614	Baik	A
2.	Bantaeng	12,004	20	14,4828	10	3,2398	15	74,7270	Perlu Perbaikan	B
3.	Pangkajene Kepulauan	10,327	18,2759	7,5000	20	3,0166	15	74,1197	Perlu Perbaikan	B
4.	Luwu Utara	6,654	19,6552	8,2759	10	2,3007	15	61,8856	Perlu Perbaikan	B
5.	Bulukumba	9,565	13,7931	12,9310	10	2,6234	10,0050	58,9175	Perlu Perbaikan	B
6.	Wajo	7,449	19,8276	5,4310	15	1,5956	5,0100	54,3132	Perlu Perbaikan	B
7.	Tana Toraja	7,998	12,0690	7,7586	15	2,5781	0	45,4039	Sangat Perlu Perbaikan	C

(Sumber Data : Bapelitbangda Tahun 2023)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas

LKPD 1(satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait dengan dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait Dokumen KUA-PPAS dan APBD;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

B. Indikator Kinerja ***“Nilai Akuntabilitas Kinerja”***.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai SAKIP Daerah adalah :

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 ditargetkan predikat BB (71,00) dan realisasi kinerja adalah B (66,51) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 93,68. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahunan yang ditetapkan tidak berhasil dicapai atau belum bisa naik predikat dari B ke BB, namun demikian untuk komponen nilai/poin mengalami peningkatan dari 64,26 menjadi 66,51 (naik 2,25 poin) dan merupakan kenaikan paling tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga tren implementasi AKIP cenderung terjadi penguatan dengan hasil nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang “baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2021	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,01	18,83	20,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,01	19,01	19,14
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,91	12,02	12,11
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	5,48	14,40	14,76
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,82	64,26	66,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

(Sumber data: Hasil evaluasi AKIP Thn 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	2021	A (80,16)	-
		2022	A (78,438)	-
		2023	A (78,438)**	100

Capaian Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Daerah	Predikat	2021	B (62,82)	-
		2022	B(64,26)	-
		2023	B(66,51)	93,68

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A (78,438)	A	A(78,438)**	A	-	A	-	A	-

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai SAKIP Daerah	BB (70,00)	B (64,26)	BB (71,00)	B (66,51)	A	-	A	-	A	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipengaruhi oleh:
 - Kapasitas Manajemen SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama yang baik ;
 - Penguatan sistem pengendalian intern dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan;
 - komitmen dan konsisten dalam menjalankan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran seperti kesesuaian nomenklatur dan pagu program RPJMD dan RKPD, RKPD dan KUA-PPAS, KUAPPAS dan APBD;
- Faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja akuntabilitas kinerja :
 - Rumusan tujuan dalam dokumen perencanaan beberapa PD belum dilengkapi dengan indikator tujuan ;
 - Perbaikan perencanaan kinerja belum sempurna dan belum merata ke seluruh PD, terutama terhadap sebagian PD utama serta pada PD klaster pendukung dan klaster tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 89 tahun 2021 ;

- Kualitas perjenjangan kinerja belum sempurna dan belum merata ke setiap PD. Di sebagian PD, pohon kinerjanya masih berorientasi pada urusan dan struktur organisasi serta program/kegiatan eksisting. Lainnya, di sebagian pohon kinerja PD belum menggambarkan hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF, terutama di level taktikal dan operasional, yang menunjukkan bahwa pohon kinerja belum menggambarkan pemecahan masalah atau solusi dari kondisi yang dihadapi;
- Penetapan target kinerja di dalam PK sebagian PD penuh sepenuhnya melihat pada capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga ditemukan penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya sebelumnya;
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat PD sebagian besar belum dilengkapi definisi operasional melainkan hanya formulasi perhitungan saja, sehingga belum sepenuhnya dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif atas formula perhitungan dan indikator kinerja ;
- Masih ditemukan formulasi indikator kinerja di tingkat Pemda yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- Laporan Kinerja PD belum sempurna pada aspek analisis informasi, sebagian belum mengungkapkan dengan jelas aspek ketercapaian kinerjanya disertai analisis keberhasilan dan kegagalan serta belum dilengkapi dengan bukti dukung dan data dukung yang relevan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja berikutnya secara optimal;
- Kualitas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja internal masih belum baik, terutama terhadap kedalaman analisis dan detail informasi;

❖ **Alternative /Solusi pemecahan masalah :**

A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- Melakukan pembahasan tindak lanjut bersama tim APIP Inspektorat agar tidak ada temua yang berulang;
- Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersama OPD;

- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan sesuai kebutuhan.

B. Nilai Akuntabilitas Kinerja :

- Melakukan revaluasi kembali atas dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan perencanaan kinerja telah mengacu pada isu strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan terkawal dalam rumusan tujuan, dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil/outcome. Selanjutnya, penetapan tujuan dan sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- Memperbaiki kualitas perjenjangan kinerja seluruh PD dengan sepenuhnya mengacu pada prinsip penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Serta memastikan bahwa perjenjangan kinerja memiliki hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF di setiap level, sampai ke level operasional.
- Memastikan bahwa penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya mengacu pada capaian dan realisasi tahun sebelumnya;
- Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan memberikan informasi definisi operasional dan memberikan penjelasan detail setiap formulasi perhitungan dengan acuan kebijakan maupun data dukung lainnya. Selanjutnya memastikan bahwa definisi operasional dan formulasi perhitungan tersebut relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, serta sesuai pada level kinerjanya;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan memperdalam analisis informasi pada pencapaian kinerja, serta memberikan data dan bukti dukungterkait yang relevan guna memperkuat analisis tersebut;
- Mendorong pemanfaatan informasi pada laporan kinerja secara optimal dengan menggunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja selanjutnya, seperti dalam penetapan target yang lebih baik, maupun dalam penyesuaian strategi maupun aktivitas dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik;
- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memperdalam analisis penilaian dan menuangkannya secara detail ke dalam LHE.

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Rep Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran ;
 - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat Mendesak

- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Standar Harga;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Penilaian Barang Milik Daerah;
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Penataan Kelembagaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.341.290.039.024 dengan realisasi sebesar Rp.336.207.256.812 atau 98,51% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,49%.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK* ” dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	IKM Pelayanan SPM	Nilai	84.75	98,49**	116,21%
2.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	84,31	87,84	104,19%
Rata-Rata Capaian Kinerja			110,2%		

Catatan: **): angka sementara

A. Indikator Kinerja “*IKM Pelayanan SPM*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan SPM adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1 \times X$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi :

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penerapan dan Pencapaian SPM yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ditargetkan dengan nilai sebesar 84,75 dan realisasi kinerja adalah 98,49 (angka sementara) atau predikat **TUNTAS UTAMA** dengan persentase capaian sebesar 116,21%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target pada indikator kinerja tersebut. Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM ini merupakan pencapaian tahun kedua sesuai dengan IKU 2022-2026 Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023, Hasil penilaian IKM Pelayanan SPM ini untuk kedua kalinya dilakukan Evaluasi Penerapan SPM berdasarkan e-SPM Secara Nasional yang bersumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik.

IKM merupakan cara untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat menerima layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan keberhasilan pelayanan penyelenggaraan publik, yang dilakukan melalui survei IKM. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai peningkatan IKM adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana telah diatur dalam UU Nomor 32/2004 Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM merupakan alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata berdasarkan jenis pelayanan, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan. Adapun Bidang urusan yang menjadi target survey IKM adalah :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial;

B. Indikator Kinerja “***IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan***”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Lama Sekolah adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2023 yang merupakan pencapaian tahun kedua sesuai dengan IKU Kabupaten 2022-2026 dan perjanjian kinerja ditargetkan dengan nilai 84,31 dan capaian realisasi sebesar 87,84 dengan persentase capaian 104,19%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun tabel perhitungan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2023**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
5	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
6	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
7	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
8	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
11	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
13	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
14	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
15	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
16	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
20	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
28	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
29	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
30	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
31	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
32	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
33	4	4	3	4	3	3	3	3	3	

34	3	4	3	4	3	4	3	4	4
35	4	3	3	4	4	4	4	4	4
36	4	3	4	4	4	4	4	3	4
37	4	4	4	4	4	4	3	3	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	4	4	3	4	4	4	4
40	4	4	3	4	3	4	4	4	4
41	4	3	3	4	4	3	4	3	4
42	4	3	4	4	3	4	3	3	4
43	4	3	4	4	4	4	4	4	4
44	4	3	3	4	3	3	3	4	4
45	4	3	3	4	3	3	4	4	4
46	3	4	3	4	3	3	4	3	3
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3
48	4	3	3	4	3	3	4	4	4
49	3	3	3	4	4	3	3	3	3
50	3	3	3	4	3	4	3	3	4
51	4	3	3	4	4	4	4	4	4
52	3	3	4	4	3	4	4	4	4
53	3	3	4	4	3	3	4	4	4
54	4	3	3	4	4	3	3	3	4
55	3	3	3	4	3	3	3	3	3
56	3	4	4	4	4	4	3	3	4
57	3	3	3	4	3	3	4	4	3
58	4	3	3	4	4	3	3	4	3
59	4	4	3	4	3	3	3	4	3
60	3	3	3	4	3	4	4	3	3
61	4	4	3	4	3	4	3	4	3
62	3	4	4	4	3	4	3	3	3
63	3	3	3	4	3	4	3	4	3
64	4	3	3	4	3	4	3	3	4
65	3	4	3	4	3	4	4	4	3
66	4	4	3	4	3	3	4	3	4
67	3	3	3	4	4	3	4	3	3
68	3	4	3	4	3	3	4	4	3
69	4	4	4	4	3	3	3	3	3
70	3	3	3	4	4	3	4	4	4
71	3	3	3	4	4	3	3	3	3
72	3	3	3	4	4	3	3	4	3

73	3	3	4	4	4	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	3	3	4	3
75	3	3	4	4	3	3	4	3	3
76	3	3	3	4	4	4	3	4	4
77	4	4	3	4	3	4	3	3	3
78	3	3	2	4	3	2	3	2	3
79	3	4	4	4	3	3	4	3	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4
82	4	3	3	4	4	4	4	4	4
83	3	4	4	4	3	3	3	4	4
84	3	4	3	4	3	4	4	4	3
85	4	4	3	4	3	3	3	4	4
86	3	4	4	4	3	4	3	3	4
87	3	3	3	4	3	4	3	3	3
88	4	3	4	4	3	4	4	4	3
89	3	3	3	4	3	4	3	3	3
90	4	4	4	4	3	4	4	4	4
91	3	3	3	4	3	3	4	3	3
92	4	4	3	4	4	3	4	3	3
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	3	4	4	4	3	4	4	4
96	4	4	3	4	3	3	4	3	4
97	4	3	3	4	3	4	3	4	3
98	3	3	4	3	3	4	3	4	4
99	4	3	3	4	3	3	3	3	3
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4
101	3	3	3	4	3	3	3	4	3
102	4	4	4	4	3	4	4	4	4
103	3	4	3	4	3	3	3	3	3
104	4	4	3	4	3	4	4	3	3
105	3	3	3	4	3	3	4	3	3
106	4	4	3	4	3	3	3	3	4
107	3	3	3	4	3	3	3	3	4
108	3	4	4	4	4	4	4	4	4
109	3	3	3	4	3	3	3	3	4
110	3	3	3	4	3	3	3	3	4
111	3	3	3	4	3	3	3	3	4

112	4	3	4	4	4	3	3	4	4
113	3	3	3	4	3	3	3	4	4
114	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	3	3	3	4	3	3	4	4	4
116	3	4	3	4	3	3	3	3	3
117	4	3	3	4	3	3	4	3	3
118	3	4	3	4	3	3	3	3	4
119	4	3	3	4	3	4	3	4	4
120	4	3	3	4	3	3	3	3	4
121	4	3	3	4	3	3	4	3	4
122	3	3	4	4	3	3	3	4	3
123	3	4	4	3	3	3	3	3	4
124	3	3	3	4	3	3	3	3	3
125	3	3	4	4	3	4	3	4	4
126	4	3	3	4	3	3	3	4	4
127	3	4	4	4	4	3	3	4	3
128	4	3	3	4	3	3	3	4	3
129	3	4	3	4	3	3	4	3	4
130	4	3	4	4	3	3	3	3	3
131	3	4	3	4	3	4	3	3	3
132	4	3	3	4	3	4	3	3	3
133	3	3	3	4	3	3	3	3	4
134	4	3	3	4	3	4	4	4	4
135	3	4	3	4	4	3	3	3	4
136	3	4	3	4	3	3	3	3	4
137	4	3	3	4	3	4	3	3	3
138	4	3	3	4	3	3	4	3	4
139	4	3	4	4	3	3	4	3	3
140	4	4	3	4	3	4	4	4	4
141	4	4	4	4	3	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	3	3	3	4
143	4	4	3	4	3	4	3	4	3
144	4	3	3	4	3	4	3	3	4
145	4	3	4	4	3	4	3	4	3
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	3	3	4	4	3	3	4	4	3
148	4	3	4	4	3	3	3	3	4
149	4	4	3	4	3	3	4	4	3
150	3	3	4	4	3	3	3	3	4

151	4	4	4	4	3	3	4	3	4
152	4	4	4	4	3	3	4	4	4
153	4	4	4	4	3	4	4	3	4
154	4	3	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	4	4	3	3	3
156	3	4	3	4	4	3	3	3	4
157	4	4	3	4	4	4	4	4	4
158	3	3	3	4	4	4	4	3	4
159	3	4	3	4	4	4	4	3	3
160	3	4	3	4	3	3	3	4	4
161	3	3	4	4	3	3	4	3	4
162	4	4	4	4	4	4	3	3	4
163	3	4	3	4	4	3	3	4	3
164	4	4	4	4	3	4	4	3	4
165	4	4	3	4	3	4	4	4	4
166	3	3	4	4	3	4	3	4	4
167	4	3	3	4	4	4	4	4	3
168	4	3	4	4	3	4	3	4	4
169	4	3	3	4	3	3	4	3	3
170	4	4	4	4	3	4	3	4	4
171	4	3	3	4	4	3	4	3	3
172	3	3	3	4	3	4	3	4	4
173	3	3	3	4	4	4	4	3	4
174	3	4	4	4	4	4	4	4	3
175	4	4	3	4	3	3	3	4	3
176	3	3	4	4	3	4	4	4	4
177	3	3	3	4	3	4	3	4	3
178	4	3	4	4	3	4	4	4	4
179	3	4	3	4	4	4	4	3	4
180	3	4	3	4	3	3	4	4	3
181	3	3	4	4	4	3	3	4	3
182	4	4	3	4	3	4	3	4	3
183	3	4	3	4	4	4	3	4	4
184	4	3	4	4	4	4	4	4	4
185	3	4	3	4	3	4	4	3	4
186	4	3	3	4	3	4	4	4	3
187	4	3	4	4	3	4	3	4	4
188	4	3	3	4	3	3	4	3	3
189	4	3	3	4	3	3	3	3	4

190	4	3	3	3	3	3	4	4	3
191	4	4	3	4	3	4	3	4	4
192	3	4	3	4	3	3	3	3	3
193	4	4	3	4	3	4	4	4	3
194	3	4	3	4	3	3	4	3	4
195	3	4	3	4	3	4	3	3	3
196	4	3	4	4	3	3	4	3	4
197	4	4	4	4	3	4	3	4	4
198	4	3	3	4	3	3	4	3	4
199	4	3	3	4	3	3	4	3	3
200	3	4	3	4	3	4	3	3	4
201	3	3	4	4	4	3	3	4	4
202	4	3	3	4	3	4	3	4	4
203	3	4	3	4	3	3	3	3	3
204	4	3	3	4	3	3	3	3	4
205	3	3	3	4	3	3	3	3	4
206	3	3	3	4	3	4	4	3	3
207	4	4	3	4	3	3	3	3	3
208	3	3	3	4	3	4	3	4	3
209	3	4	3	4	3	3	4	3	4
210	4	3	4	4	3	3	4	3	4
211	3	3	4	4	3	3	3	4	3
212	4	4	4	3	3	3	3	3	4
213	4	3	3	4	3	3	3	3	3
214	3	3	4	4	3	4	3	4	4
215	4	3	3	4	3	3	3	4	4
216	4	3	4	4	3	3	3	4	3
217	4	3	3	4	3	3	3	4	3
218	3	4	3	4	3	3	4	3	4
219	4	3	4	4	4	3	3	3	3
220	3	4	3	4	3	4	3	3	3
221	4	3	3	4	3	4	3	3	3
222	3	3	3	4	3	3	3	3	4
223	4	3	3	4	3	4	4	4	4
224	3	4	3	4	4	3	3	3	4
225	3	4	3	4	3	3	3	3	4
226	4	3	3	4	3	4	3	3	3
227	4	3	3	4	3	3	3	3	4
228	4	3	4	4	3	3	3	3	3

229	4	4	3	4	3	4	4	4	4
230	4	3	4	3	3	4	4	4	4
231	3	4	4	4	3	3	3	3	4
232	4	4	3	4	3	4	3	4	3
233	3	4	3	4	3	3	3	3	4
234	4	3	4	4	3	4	3	4	3
235	3	4	3	4	4	4	3	4	4
236	4	3	4	4	3	3	4	4	3
237	4	3	3	4	3	3	3	3	4
238	3	4	3	4	3	3	4	4	3
239	3	3	4	4	3	4	3	3	4
240	4	3	4	4	3	3	4	3	4
241	4	4	4	4	3	3	4	4	4
242	3	3	4	4	3	4	4	3	4
243	4	3	4	4	4	3	4	4	4
244	3	4	3	4	4	4	3	3	3
245	3	4	3	4	4	3	3	4	4
246	4	4	3	4	4	4	4	4	4
247	4	3	3	4	4	4	4	3	4
248	3	4	3	4	4	4	4	3	3
249	3	4	3	4	3	3	3	4	4
250	4	3	4	4	3	3	4	3	4
251	4	3	4	4	4	4	3	3	4
252	3	4	3	4	4	3	3	4	3
253	3	4	4	4	3	4	4	3	4
254	4	4	3	4	3	4	3	4	4
255	4	3	4	4	3	4	3	4	4
256	3	3	3	4	4	4	4	4	3
257	4	3	4	4	3	4	3	4	4
258	3	3	3	4	3	3	4	3	3
259	4	4	4	4	3	4	3	4	4
260	3	3	3	4	4	3	4	3	3
261	3	3	3	4	3	4	3	4	4
262	4	3	3	4	4	4	4	3	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	3
264	4	4	3	4	3	3	3	4	3
265	3	3	4	4	3	4	4	4	4
266	4	4	3	4	3	3	3	3	4
267	3	3	4	4	3	4	3	4	4

268	3	4	3	4	3	4	3	4	3
269	4	3	3	4	3	4	3	3	4
270	3	3	3	4	3	3	4	4	3
271	4	3	3	4	3	4	4	4	4
272	3	3	3	4	3	3	3	3	4
273	4	3	4	4	4	3	3	3	3
274	3	4	3	4	4	3	4	4	4
275	4	3	4	4	3	3	4	3	4
276	3	4	4	4	4	4	4	4	4
277	3	3	3	4	3	3	4	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	4	4	4	4	3	3	3	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	3	4	4	3	3	4	4	3
282	3	3	4	4	3	3	3	3	4
283	4	4	3	4	3	4	3	3	3
284	4	3	3	4	3	3	3	4	3
285	4	4	4	4	3	4	3	4	4
286	3	4	4	4	4	4	4	4	4
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	4	4	4	4	4
290	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	3	4	3	4	4	4	3	3	4
292	3	4	3	4	3	4	4	4	4
293	4	4	4	3	3	3	3	3	4
294	4	4	3	4	3	3	3	3	3
295	3	4	3	4	3	3	4	3	4
296	4	3	3	4	3	3	3	4	3
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	3	4	4	4	4	4	4	4	4
299	4	3	3	4	3	3	3	3	4
300	3	3	3	4	4	3	4	3	3
301	4	4	3	4	3	4	3	4	3
302	4	4	3	4	3	4	3	4	3
303	3	3	4	4	4	3	3	4	3
304	4	3	3	4	3	3	3	3	4
305	3	4	3	4	3	4	3	3	3
306	4	3	4	4	3	4	3	4	3

307	4	3	4	3	3	4	4	4	4
308	3	4	3	4	3	3	3	3	4
309	4	4	4	4	3	3	4	4	4
310	4	3	3	4	4	3	4	3	4
311	3	4	3	4	3	3	4	4	3
312	4	3	4	4	3	3	4	3	4
313	4	4	3	4	3	4	4	3	3
314	4	3	4	4	3	3	4	3	4
315	4	4	3	4	4	4	3	4	4
316	4	3	4	4	4	4	3	3	3
317	3	4	3	4	3	4	3	3	4
318	4	3	3	4	3	3	4	3	4
319	3	4	3	4	3	3	3	3	3
320	4	4	3	4	3	3	3	3	4
321	3	3	4	4	3	4	3	4	3
322	4	3	3	4	4	3	4	3	4
323	4	3	3	4	3	4	3	4	3
324	4	4	4	4	3	3	4	4	4
325	4	4	3	4	4	4	4	4	3
326	4	3	3	4	3	3	3	4	4
327	3	4	4	4	4	3	3	3	3
328	3	4	4	4	3	3	4	3	4
329	4	3	4	4	4	3	3	4	4
330	4	3	4	4	4	4	4	4	3
331	3	3	3	4	3	3	3	4	3
332	3	4	3	4	4	3	4	4	3
333	4	4	4	4	3	3	3	3	3
334	3	3	3	4	3	4	3	4	3
335	3	4	4	4	4	3	3	3	4
336	4	3	4	4	3	3	4	3	4
337	3	3	3	4	4	4	3	3	3
338	4	4	3	4	3	3	4	3	3
339	4	4	4	4	3	4	4	3	3
340	3	4	4	3	4	4	3	4	4
341	4	3	3	4	3	4	3	3	4
342	3	3	3	4	4	3	3	4	3
343	4	4	3	4	4	4	4	4	4
344	4	4	4	4	4	4	4	4	4
345	4	4	4	4	4	4	4	4	4

346	4	4	3	4	3	3	4	4	3
347	4	4	4	4	4	3	3	3	4
348	3	3	3	3	3	3	3	3	3
349	3	4	3	4	3	3	3	3	3
350	3	3	3	4	4	3	4	4	4
351	3	4	4	4	4	3	3	4	4
352	3	4	3	4	3	3	4	3	3
353	4	3	3	4	3	4	3	4	3
354	3	4	3	4	3	4	3	3	4
355	3	3	4	4	4	4	3	3	3
356	4	3	4	4	3	3	4	3	4
357	4	3	4	4	3	4	4	4	3
ΣNilai /Unsur	1260	1232	1202	1419	1175	1234	1231	1243	1293
NRR / unsur	3,529	3,451	3,367	3,975	3,291	3,457	3,448	3,482	3,622
NRR tertbg/ unsur	0,392	0,383	0,374	0,442	0,366	0,384	0,383	0,387	0,402
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan									

	No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
Keterangan :	U1	Persyaratan	3,529
- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan	U2	Prosedur	3,451
- NRR = Nilai rata-rata	U3	Waktu pelayanan	3,367
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat	U4	Biaya/tarif	3,975
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang	U5	Produk layanan	3,291
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25	U6	Kompetensi pelaksana	3,457
NRR Per Unsor = Jumlah nilai per unsor dibagi	U7	Perilaku pelaksana	3,448
Jumlah kuesioner yang terisi	U8	Sarana dan Prasarana	3,482
NRR tertimbang = NRR per unsor x 0,111	U9	Penanganan Pengaduan	3,622
per unsor			
IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 87,84 = Baik			
Mutu Pelayanan :			
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00			
B (Baik) : 76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60			
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99			

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan SPM	Nilai	2021	-	-
		2022	91,65	111,20%
		2023	98,49**	116,21%

Catatan: **): angka sementara

Capaian IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	2021	-	-
		2022	87,80	106,80%
		2023	87,84	104,19%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	IKM Pelayanan SPM	82,42	91,65	84,75	98,49**	85,68	-	87,78	-	90	-

Catatan: **): angka sementara

(Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:)

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	82,21	87,80	84,31	87,84	86,23	-	88,10	-	88,32	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

A. IKM Pelayanan SPM :

1. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
2. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang memadai
3. Penempatan tenaga pendidik dilakukan secara merata,
4. Peningkatan KIE kepada ibu hamil, sehingga melahirkan di fasilitas Kesehatan.
5. Penyediaan sarana mobilitas untuk menjemput dan mengantar pulang ibu yang bersalin di puskesmas.
6. Bidan desa yang aktif melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.
7. Dukungan Anggaran yang sangat baik dalam memacu pelayanan spm
8. Dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
9. Penanganan yang tanggap terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,
10. alokasi anggaran untuk pendataan cukup maksimal, sehingga identifikasi yang dilakukan bersifat makro.
11. Untuk Capaian dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 250 org, Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD, Penyebaran informasi melalui FB, IG 1.895 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 10 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 274.359 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 276.254 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (baseline data). Capaian yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan peringatan dini bencana karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat,

12. Capaian dari Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 43 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 50 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Alat ini ditempatkan di kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa (baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
13. Capaian dari Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui perhitungan jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 laki-laki dan 650 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.
14. Adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM dan intensifnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM.

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Adanya peningkatan pelayanan perizinan karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan pelayanan Petugas yang ramah dan ruangan pelayanan

yang nyaman sehingga masyarakat/pelaku usaha merasa nyaman dan puas, dengan aplikasi OSS sehingga memberi kemudahan dalam pengurusan Izin menyebabkan percepatan waktu dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan lebih singkat;

2. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
2. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
3. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemerataan guru pada satuan pendidikan,
4. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
5. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaraan,
6. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,
7. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
8. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan,
9. Pencegahan perkawinan usia dini dan Peningkatan KIE tentang Kesehatan reproduksi pada remaja
10. Pendampingan 1000 HP, mulai dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun oleh bidan, jadi semua bidan harus ada ibu hamil/bayi yang didampingi.
11. Pemberdayaan kader untuk menggerakkan masyarakat yang punya balita agar dibawa ke posyandu setiap bulannya.
12. Pengadaan strip kolesterol sesuai jumlah warga lanjut usia
13. Dukungan anggaran perlu ditingkatkan

14. Diperlukan tambahan personil pada bidang yang menangani SPM
15. Diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
16. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan
17. Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi-lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
18. Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana
19. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
20. Memaksimalkan penyebaran informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
21. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
22. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
23. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun,
24. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
25. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
26. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
27. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
28. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
29. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,
30. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
31. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada dirjen bina pembangunan daerah terkait indikator dan capaian kinerja SPM;

32. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
33. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,
34. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
35. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparaturnya pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar
36. Pelaksanaan pendataan PPKS Target SPM;
37. Pengusulan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Mengembangkan inovasi inovasi yang diharapkan akan mampu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam hal ini pengurus izin, seperti inovasi si Kumiz yang saat ini sedang di aplikasikan dalam proses perizinan dan non perizinan;
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi secara offline maupun online;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan melakukan pelatihan dan konsultasi.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
10. Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota;
11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
12. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Program Penanggulangan Bencana;
14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
15. Program Rehabilitasi sosial;
16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.190.114.594.305 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.185.893.070.173 atau 97,78% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,22%.

Misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat dengan tujuan “Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Norma Ketertiban dan Ketentraman “**. Untuk mencapai misi 5, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidang ketertiban dan ketentraman, pemadam kebakaran dan penyelamatan dan kesatuan bangsa dan politik.

Sasaran Strategis 10

Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *TERPELIHARANYA RASA AMAN DAN DAMAI DALAM MASYARAKAT*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	76,81	81,67	106,33%
Rata-Rata Capaian Kinerja			106,33%		

B. Indikator Kinerja “*Indeks Ketertiban dan Ketentraman*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban umum adalah :

Indikator indeks ketertiban dan ketentraman dibentuk oleh nilai rata-rata :

1. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara;
2. Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Persentase Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten;

4. Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%);
5. Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)

$$\begin{aligned}\text{Indeks Ketertiban dan Ketentraman} &= 9,22 + 72,45 \\ &= 81,67\end{aligned}$$



Untuk indikator kinerja tahunan Indeks Ketertiban dan Ketentraman Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 76,81 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 81,67 dan persentase capaian kinerja 106,33%. Artinya menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kerja Utama (IKU) Kabupaten 2022-2026. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana target kinerja tahunan sebesar 76,72 dan realisasi capaian sebesar 59,82 dengan persentase capaian kinerja 77,97, terjadi peningkatan capaian kinerja..

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Kinerja *Indeks Ketertiban dan Ketentraman* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Indikator ini merupakan capaian tahun kedua berdasarkan IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan capaian target dan realisasi tahun sebelumnya). dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	2021	-	-
		2022	59,82	77,97%
		2023	81,67	106,33%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Ketertiban dan ketentraman	76,72	59,82	76,81	81,67	77,21	-	77,43	-	77,86	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Kebijakan penempatan personil Satpol PP di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah dapat lebih intens dilakukan;
- ✓ Pemanfaatan media sosial dalam menyebarkan informasi -informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam melaporkan adanya pelanggaran dan memberikan kritik dan saran untuk peningkatan kinerja Satpol PP;
- ✓ Peranan PPNS dalam penyelesaian kasus Pelanggaran Perda/Perkada;

- ❖ **Alternative Solusi Yang dilakukan :**

- ✓ Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat;
- ✓ Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepomongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda;
- ✓ melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- ✓ Pembukaan Wilayan Manajemen Kebakaran (WMK) untuk daerah kecamatan yang belum memiliki WMK.

- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
 - g. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
- ✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.7.795.973.040 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.7.583.233.351 atau 97,27% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,73%.

Misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya”** dengan tujuan **“Meningkatkan Toleransi dan Kualitas Kehidupan Beragama serta Ketahanan Budaya Daerah “**. Untuk mencapai misi 6, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan yang membidang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN* ” dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	95	96,1	101,16%
2.	Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	%	95	82,4	86,74%
Rata-Rata Capaian Kinerja			93,95%		

A. Indikator Kinerja “*Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat adalah :

Dimana : Cakupan Kinerja Kesejahteraan Rakyat

1. $A = \frac{\text{Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan}} \times 100\%$

2. B = Jumlah jemaah haji yang difasilitasi/Jumlah jemaah haji x 100%
3. C = Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi/Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan x 100%
4. D = Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif/Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan x 100% ,
5. E = Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah/Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan x 100%))

$$\text{Rata-rata Persentase (\%)} = \frac{A + B + C + D + E}{5}$$

- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi = 10
- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan = 12
- Jumlah Jemaah Haji = 159
- Jumlah Jemaah haji Yang di Fasilitas = 159
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi =23
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan = 23
- Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif =95
- Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan = 95
- Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah = 81
- Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan = 83

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata Persentase (\%)} &= \frac{(10/12 \times 100\%) + (159/159 \times 100\%) + (23/23 \times 100\%) + (95/95 \times 100\%) + (81/83 \times 100\%)}{5} \\
 &= \frac{(83) + (100) + (100) + (100) + (97,6)}{5} \\
 &= 480,5 / 5 \\
 &= 96,1
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja 96,1 dengan persentase capaian sebesar 101,16%. Hal ini menunjukkan bahwa target tercapai atau keberhasilan pencapaian target. Indikator ini merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026.

Kehadiran **agama** secara fungsional sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa **masyarakat** menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kehidupan beragama dalam masyarakat. Nilai Agama terdiri dari beberapa bentuk yaitu **Aqidah**, merupakan sebuah sistem dari kepercayaan dan keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, **Akhlak** yaitu seperangkat perilaku atau sifat dari seorang individu yang telah melekat dalam diri. Dari sifat-sifat tersebutlah, kemudian menimbulkan perbuatan yang mudah dilaksanakan tanpa harus memikirkan pertimbangan terlebih dulu. **Ibadah** yaitu sebuah bentuk pengabdian individu terhadap Tuhannya dengan berorientasikan pahala. Tujuan Pembentukan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Agar terhindar dari adanya krisis identitas diri yang membuat seorang individu tidak dapat menentukan nasibnya sendiri;
2. Menjadikan bekal berupa ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya;
3. Agar hidup seorang individu menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas;
4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun untuk beragam contoh nilai-nilai dalam agama di masyarakat, antara lain;

1. Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut.
2. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat duniawi.
3. Memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dan alam sekitar.

4. Menyantuni anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan disaat sedang memiliki banyak rejeki.
5. Tidak mengeksploitasi secara berlebih sumber daya alam yang tersedia untuk kelangsungan kehidupan generasi di masa mendatang.
6. Tidak melakukan perjudian dengan tujuan untuk menyambung hidup.
7. Tidak melakukan tindakan provokatif mengatasnamakan agama.
8. Menciptakan kedamaian dengan cara saling berbagi terhadap sesama.
9. Melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan.
10. Menjunjung tinggi perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya.
11. Tidak membuang sampah sembarangan.
12. Membantu teman saat tertimpa musibah tanpa memandang agama yang dianutnya.
13. Membantu masyarakat sekitar dalam membangun tempat peribadatan.
14. Mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
15. Mewujudkan cita-cita dengan menggunakan usaha sendiri tanpa harus berbuat kecurangan.
16. Tidak memaksakan kehendak individu lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita.
17. Mengedepankan tenggang rasa dalam bermasyarakat.
18. Bertoleransi dalam menjalani kehidupan sosial.
19. Tidak mencontek saat ujian sedang berlangsung.
20. Tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang melakukan prosesi peribadatan.
21. Mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan.
22. Tidak membicarakan keburukan orang lain.
23. Memelihara kebersihan dan keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
24. Tidak menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas.
25. Tidak menyebarkan kebencian kepada masyarakat luas.
26. Memberikan masukan yang sifatnya positif terhadap kinerja pemerintah.
27. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara.
28. Tidak ikut mabuk-mabukan.
29. Tidak melanggar rambu lalu lintas saat sedang berkendara.

30. Selalu berpikir positif dalam menyikapi sesuatu.
31. Berperilaku sopan terhadap orang yang usianya lebih tua dari kita.
32. Bertanggung jawab ketika merusak barang yang bukan milik sendiri.

B. Indikator Kinerja ***“Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat”***.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah

Cakupan pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan dimana:

A=Persentase capaian kegiatan Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (%) (Dinas Lingkungan Hidup) = 0

B=Persentase capaian kegiatan kebudayaan lokal yang dilestarikan (%) =80

C=Persentase capaian sanggar seni budaya yang dibina (%) = 100

D=Persentase capaian kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%) (KesbangPol) = 100

E=persentase capaian pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%) = 100

F=persentase capaian sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan (%) = 100

G=Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (%) (PMD) = 96,80

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata (\%)} &= \frac{A+B+C+D+E+F+G}{7} \\
 &= \frac{0+80+100+100+100+100+96,80}{7} \\
 &= \frac{576,8}{7} \\
 &= 82,4
 \end{aligned}$$

Untuk indikator *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja sebesar 82,4% dengan persentase capaian kinerja sebesar 86,74% . Hal menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih belum dapat dicapai atau penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat belum optimal. Indikator ini

merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	2021	-	-
		2022	71,9	75,68%
		2023	96,1	101,16

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	%	2021	-	-
		2022	53,79	56,62%
		2023	82,4	86,74

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan)

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	95	71,9	95	96,1	95	-	95	-	95	-
2	Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	95	53,79%	95	82,4	95	-	95	-	95	-

❖ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran kinerja :**

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

1. Seluruh kegiatan keagamaan terlaksana sesuai dengan target penerima yang direncanakan.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target sasaran kinerja:**

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. Masih kurangnya data kebudayaan lokal yang dilestarikan karena belum adanya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah yang memuat semua data kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan;
2. Masih kurangnya cagar budaya yang ditetapkan.
3. Target yang ditetapkan terlalu tinggi;
4. Terbatasnya sumber daya manusia pada beberapa OPD Pengampu untuk melakukan tugas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

❖ **Alternative Solusi yang dilakukan :**

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

1. Pengajuan proposal penerimaan dana hibah dilakukan atau diterima pihak terkait sebelum penetapan KUA-PPAS Pokok atau Perubahan atau sesuai dengan regulasi batas waktu pengajuan proposal dana hibah pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. diperlukan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan (PPKD) Kabupaten Luwu Timur yang dijadikan dasar untuk mengelola cagar budaya dan seni budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu dibutuhkan SDM yang memadai untuk mengelola cagar budaya, seni budaya dan untuk melestarikan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Luwu Timur disamping itu juga tentunya harus di dukung dengan Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan kebudayaan;

2. Memaksimalkan fungsi tim dan forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Luwu Timur;
3. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi serta pemberdayaan forum-forum strategis yang terbentuk di daerah.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang sasaran**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
2. Program Pengembangan Kebudayaan
 Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
 Sub Kegiatan Penelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
 Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
 Sub Kegiatan Peningkatan pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia kesenian tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah
 Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah daerah kabupaten/kota;
 Sub Kegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota;
 Sub Kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 Kegiatan Peningkatan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota;
 Sub Kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya;
 Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.

7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

✓ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.21.647.997.590 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.20.875.033.896 atau 96,43% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,57%.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada era otonomi daerah, akuntabilitas menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan **“good governance** sekaligus **clean government”**. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis dengan 23 indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran rata-rata capaian kinerja dan persentase realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.1
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	102,35%	97,27%	2,73%
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	100%	90,84	9,16%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	101,07%	97,53%	2,47%
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	60,10%	94,34%	5,66%
5.	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	56%	98,96	1,04%
6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	112,46%	92,09%	7,91%
7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	111,96%	86,43%	13,57
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	96,84%	98,51%	1,49%
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110,2%	97,78%	2,22%
10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	106,33%	97,27%	2,73%
11.	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	93,95%	96,43%	3,57%

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.123.841.577.219,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.021.710.065.869,25 atau 95,19%, berdasarkan data hasil audit BPK. Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(RP)	(RP)	%
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	390.691.353.806,00	394.401.978.544,58	100,95
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.731.693.563,59	103,41
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.336.593.699,00	121.100.522.453,99	98,19

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir tahun 2023, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.394.401.978.544,58 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.390.691.353.806,00 atau mencapai 100,95%. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 246.731.693.563,59 atau sebesar 103,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 238.588.526.149,00;
2. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.981.187.069,00 atau sebesar 57,58 dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 5.177.658.500,00;
3. Realisasi Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Sebesar Rp. 23.588.575.458,00 atau sebesar 100,00 % dari target yang ditetapkan 23.588.575.458,00.
4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 121.100.522.453,99 atau 98,19% dari target sebesar Rp. 123.336.593.699,00.

Aspek Belanja Daerah

Tabel III.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
5.1.	Belanja Operasi	1.266.763.111.781,00	1.192.238.807.683,66	94,12
5.2	Belanja Modal	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	10,96
5.4	Belanja Transfer	331.256.898.338,00	330.962.845.481,60	99,91
6.1	Penerimaan Pembiayaan	173.616.646.898,00	173.616.646.898,24	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82,00
	Jumlah	2.021.710.065.869,25	2.021.710.065.869,25	95,19

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Luar Biasa, Kabupaten Luwu Timur Sabet Dua Penghargaan dari Kemenkes RI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur berhasil menyabet dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI di Tahun 2023 ini. Keduanya adalah penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

General, News, Pemerintahan 🕒 November 29, 2023



2. DPK Lutim Raih Juara I Stand Terbaik di Festival Aksara Lontaraq ke IV Sulsel

Lutim,warta.luwutimur.go.id- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) berhasil meraih juara I Stand Terbaik dengan tema kain Taipa, pada Festival Aksara Lontaraq ke IV

General, News, Pemerintahan 🕒 November 21, 2023



3. Satu-Satunya di Luwu Raya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Terima Penghargaan ProKlim 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menorehkan tinta emas di kancah nasional. Pasalnya, daerah berjuluk Bumi Batara Guru ini lagi-lagi menerima sebuah

General, News, Pemerintahan 🕒 Oktober 24, 2023



4. **Peduli Gerakan Transisi PAUD ke SD, Sufriaty Budiman Terima Penghargaan Dari Kemendikbudristek**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bunda PAUD Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Hj. Sufriaty Budiman menerima Piagam Penghargaan Kategori Wiyata Darma Pratama dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

General, News, Pemerintahan 🕒 November 8, 2023



5. **Dua Sekolah di Lutim Berhasil Meraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2023**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Dua Sekolah asal Kabupaten Luwu Timur, yakni UPT SP SD Negeri 221 Malili dan UPT SP SMP Negeri 1 Tomoni berhasil

General, News, Pemerintahan 🕒 Oktober 17, 2023



6. **Sekda Lutim Terima Piala dan Piagam KLA Tahun 2023 Kategori Madya**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli menerima Piala dan Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 kategori Madya yang

General, News, Pemerintahan 🕒 Agustus 16, 2023

f Sebar

🐦 Tweet



7. **Bupati Budiman Terima Penghargaan Sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menghadiri secara langsung pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) VI tingkat

General, News, Pemerintahan 🕒 Juli 25, 2023



8. **Lutim Raih Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Kategori “BB” Sangat Baik**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Setelah Sukses mendapatkan penghargaan atas Konsistensi dan keberhasilan dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI, Luwu Timur kembali meraih penghargaan di bidang Kearsipan, yakni

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 24, 2023

f Sebar

🐦 Tweet



9. **Konsisten dan Berhasil Implementasikan Aplikasi SRIKANDI, Bupati Lutim Terima Penghargaan dari ANRI**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman terus menorehkan prestasi. Kali ini, Budiman menerima penghargaan tingkat nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 22, 2023



10. **Lutim Terima WTP ke-11, Bupati Budiman : Prestasi Ini Berkat Kerjasama Semua Pihak**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 15, 2023



11. **Puskemas Mahalona Sabet Juara I Lomba Video Testimoni Imunisasi Suntikan Ganda tingkat Nasional**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Puskemas Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berhasil menyabet Juara I Lomba Video Testimoni Imunisasi Suntikan Ganda yang diselenggarakan oleh Kementerian

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 9, 2023



12. Inovasi Pospenting PKM Bone Pute Masuk Top 30 KIPP 2023 Provinsi Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan UPTD Puskesmas Bone Pute Kecamatan Burau, yakni inovasi Pospenting atau Posyandu Pencegahan Stunting yang diinisiasi oleh Inovatornya Sirjhon

General, News, Pemerintahan 🕒 April 12, 2023



13. Hj. Sufriaty Terima Piagam Penghargaan Dari Gubernur Sulawesi Selatan

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) atas dedikasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2021-2022, Ketua Forum Kabupaten

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 22, 2023



14. Sukses Kendalikan Covid-19, Lutim Terima Penghargaan PPKM Award 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Setelah meraih penghargaan APBD AWARD dan UHC AWARD, Kabupaten Luwu Timur kembali meraih penghargaan tingkat nasional yaitu PPKM AWARD 2023, bahkan sukses

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 20, 2023



15. Tiga Desa Wisata Kabupaten Luwu Timur Lolos 300 Besar ADWI 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia kembali mengumumkan nama-nama Desa Wisata yang masuk peringkat 300 besar ADWI 2023 setelah sebelumnya

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 20, 2023



16. Kabupaten Luwu Timur Terima UHC Award untuk Kedua Kalinya dari Kemenkes RI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur untuk kedua kalinya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan,

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 14, 2023



17. Kabupaten Luwu Timur Wakil Sulsel Pada Anugerah Tinarbuka HAKIN Tahun 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Lomba Anugerah Tinarbuka dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023 yang diselenggarakan

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 14, 2023



18. Kabupaten Luwu Timur Sukses Meraih Adipura Tahun 2022

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur, dibawah kepemimpinan Bupati H. Budiman kembali sukses meraih penghargaan Adipura dengan kategori Kota Kecil. sebuah penghargaan yang sudah lama

General, News, Pemerintahan 🕒 Februari 28, 2023



A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian 11 (sebelas) sasaran dengan 15 (limabelas) indikator kinerja diperoleh rata-rata pencapaian keseluruhan adalah sebesar **95,57%**. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari upaya-upaya optimal dan berkelanjutan yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah untuk mampu berkinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented government) yang berdampak nyata ke masyarakat.

Untuk lebih jelas, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	102,35%
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	100%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	101,07%
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	60,10%
5.	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan lapangan Usaha	56%
6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	112,46%**
7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	111,96%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	96,84%
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110,2%
10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	106,33%
11.	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	93,95%
Rata-Rata Pencapaian Sasaran		95,57%

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Terhadap kondisi capaian kinerja tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyempurnaan perjenjangan /cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah
2. Perbaikan perencanaan kinerja pada tingkat pemda dan perangkat daerah sehingga lebih tepat sasaran dan terukur;
3. Mengadakan diklat peningkatan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas.
4. Peningkatan pelayanan publik melalui perbaikan standar-standar pelayanan, SDM serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.
5. Penciptaan kondisi wilayah yang semakin kondusif dalam berinvestasi serta dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas unggulan daerah dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, Koperasi dan UMKM serta Pariwisata.
7. Pembangunan database kinerja yang handal, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga tersedia data yang akurat. Data akurat mendukung pengambilan kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan.
8. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dan program dalam mencapai target.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik, maka Kabupaten Luwu Timur akan terus berbenah diri, memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang pernah di dapatkan menjadi pengalaman yang berharga sebagai tolak ukur mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.



Malili, 28 Maret 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

[Handwritten signature]
Drs. H. BUDIMAN., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

JL. Soekarno-Hatta No. TELP. (0474) 321455 FAX. (0474) 321455
MALILI, 92981

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malili, 27 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN,



SALAM LATIEF, SH., M.Si.CGCAE

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007